

**DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**



**2022**

**RENJA**

**Rencana Kerja**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinkes DIY) merupakan turunan dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinkes DIY. Adapun Renstra tersebut disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2017-2022.

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah DIY dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan kepala daerah dalam hal ini Gubernur DIY. RPJMD menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD DIY Tahun 2017-2022 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) DIY sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan RKPD antara tahun 2018-2022 yang selanjutnya diturunkan dalam Renja OPD. Renja Dinkes DIY digunakan sebagai sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan target pembangunan tahunan nasional dan daerah, pembangunan tahunan Daerah DIY dan kabupaten kota serta pembangunan tahunan antar daerah.

Diharapkan Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai dokumen yang memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Kesehatan DIY untuk tahun anggaran 2022.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB 1           PENDAHULUAN .....	1-1
1.1       Latar Belakang.....	1-1
1.2       Landasan Hukum .....	1-5
1.3       Maksud dan Tujuan.....	1-6
1.4       Sistematika Penulisan.....	1-6
BAB 2           HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.....	2-1
2.1       Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	2-1
2.2       Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-10
2.3       Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	2-25
2.4       Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	2-29
BAB 3           TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	3-2
3.1       Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	3-2
3.2       Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	3-5
3.3       Program dan Kegiatan .....	3-6
BAB 4           RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	4-2
BAB 5           PENUTUP.....	5-1

# DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	2-2
Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-11
Tabel 2-3 Capaian Kinerja 2020 .....	2-17
Tabel 2-4 Rumusan Indikator dan Formulasi perhitungan Pelayanan kesehatan yang Bermutu .....	2-21
Tabel 2-5 Target dan Realisasi Kinerja 2020 .....	2-21
Tabel 2-6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampangi Akreditasi .....	2-23
Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Pelayanan Kesehatan Jiwa Bermutu .....	2-25
Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja.....	2-25
Tabel 2-9 Pencapaian SPM RS Jiwa Grhasia.....	2-25
Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu .....	2-32
Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu .....	2-32
Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respirasi tahun 2020 .....	2-33
Tabel 2-13 target dan Capaian Kinerja 2020 .....	2-37
Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-38
Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	2-62
Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan.....	3-4
Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .....	3-6
Tabel 4-1 Program dan Kegiatan 2022.....	4-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH .....	1-3
Gambar 2.1 Indikator Keluarga Sehat.....	2-19
Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan .....	2-35

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan merupakan sebuah investasi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan Pembangunan kesehatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan DIY yang tercermin melalui capaian komponen pembangunan kesehatan dalam indikator Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang baik..

Derajat kesehatan sebagai indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY tergantung kepada perkembangan angka kematian dan kesakitan. Dalam konteks kesehatan, kematian yang menjadi perhatian utama adalah kematian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan kesehatan yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi kematian umum dan kematian spesifik (kematian ibu, bayi dan balita). Kematian spesifik yang menjadi perhatian prioritas memiliki pengaruh besar terhadap umur harapan hidup dikaitkan dengan besaran yang dihasilkannya.

Angka Harapan Hidup (AHH) DIY merupakan yang terbaik secara nasional dengan capaian 74,74 tahun di tahun 2017, 74.82 tahun di tahun 2018, 74,92 di tahun 2019, dan di tahun 2020 mencapai 74.99 (BPS DIY), hal tersebut menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik

Arah pembangunan kesehatan DIY telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sedangkan secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2021 didasarkan pada rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022.

Permasalahan- permasalahan pokok urusan kesehatan dalam perencanaan tahun 2022 diantaranya yakni :

- a. Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat yang ditunjukkan dengan angka prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) yang berada di atas rata-rata nasional. Menurut data Riskedas 2018 capaian prevalensi beberapa Penyakit Tidak Menular diantaranya prevalensi Diabetes Melitus di DIY 4,5% sementara angka Nasional 2,4%, untuk Hipertensi di DIY 10,7% dan angka nasional 8,4%, terkait kasus kanker, di DIY 10,7 per mil dan Nasional 8,4 per mil. Diperlukan peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai upaya meningkatkan kesadaran berperilaku hidup bersih dan sehat.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai Permenkes No 4 Tahun 2019, khususnya mengenai kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi terkait dengan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan pelayanan kesehatan dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB).

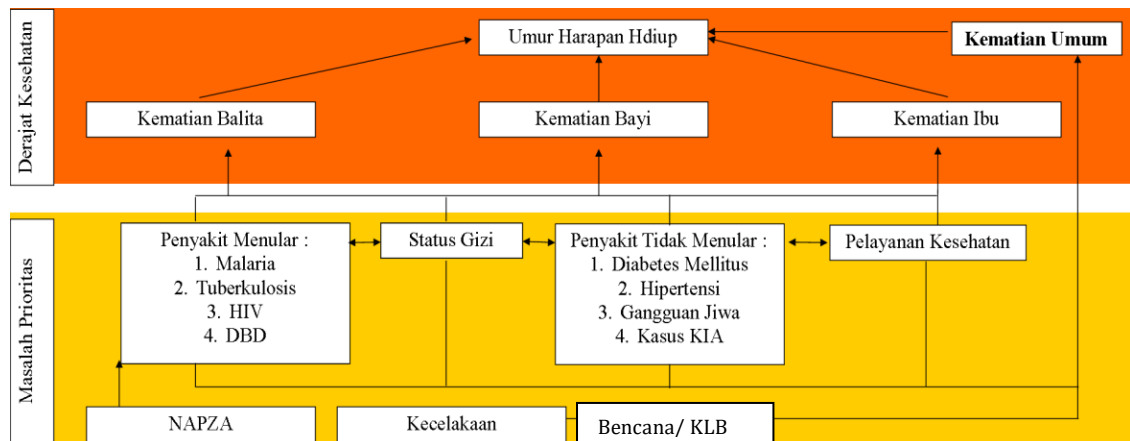


- c. Belum optimalnya fasilitas layanan kesehatan dalam antisipasi dan penanganan KLB dan bencana.
- d. Peningkatan kasus Covid-19 yang cukup tinggi di tahun 2021, sehingga perlu adanya penanggulangan dan pencegahan. Dinkes DIY telah melakukan berbagai upaya secara promotif, preventif, dan kuratif baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut misalnya penyelenggaraan vaksinasi, recruitment tenaga kesehatan dan relawan tenaga kesehatan maupun mahasiswa pendamping kesehatan, promosi kesehatan, dan pelaksanaan testing dan tracing covid-19. Pada tahun 2022 diperlukan kesinambungan upaya sehingga pandemi dapat ditangani dan selanjutnya terkendali dengan baik.
- e. Angka Stunting masih cukup tinggi. Hasil Riskesdas 2013 untuk Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita di DIY menunjukkan angka 27,30% dan angka nasional pada 37,2%, sedangkan 2018 di DIY sebesar 21,41% dan angka nasional pada 30,8 % pada 2018 dan 37,2% pada 2013. Penurunan angka di DIY lebih kecil dibanding angka nasional (penurunan sampai 6,4%).
- f. Tingginya kasus HIV/AIDS. Kondisi ini terlihat pada penambahan jumlah kasus HIV sebesar 209 dan penderita AIDS sebesar 69 orang pada tahun 2019. Data Dinas Kesehatan DIY menunjukkan akumulasi pengidap HIV AIDS dari tahun 1993 sampai dengan 2019 sebanyak 4.990 orang, dimana 1.716 orang diantaranya telah positif AIDS. Faktor penyebab utama adalah penularan melalui hubungan heteroseksual.
- g. Prevalensi gangguan jiwa Skizofrenia di DIY masih tinggi. Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka 10,36 per mil rumah tangga masih lebih tinggi dengan angka nasional sebesar 7,0 per mil.
- h. Kawasan aerotropolis Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) perlu didukung dengan keberadaan fasilitas kesehatan yang memiliki manajemen internasional.
- i. Jumlah kasus kematian ibu masih belum bisa ditekan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 36 kasus kematian ibu dengan penyebab tertinggi adalah pendarahan, sedang pada tahun 2020 jumlah kematian bu sebesar 40 kasus. Salah satu faktornya adalah kondisi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai, dan terlambat mendapat pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil.
- j. Target cakupan imunisasi di DIY adalah 95% dan telah terpenuhi untuk wilayah DIY dimana hasil laporan menunjukkan bahwa cakupan semua imunisasi tahun 2020 sudah memenuhi target karena sudah berada di atas angka 95%.

Parameter sasaran kesehatan harus terus diusahakan untuk diperbaiki seperti angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penyiapan penanganan bencana.

Selain itu perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan dalam kesehatan di DIY yakni kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih perlu ditingkatkan, Edukasi makanan sehat untuk keluarga dan siswa, belum terpadu antar stakeholder, perlunya pendampingan keluarga sehat, dan kondisi rumah sakit dan puskesmas yang

belum ramah terhadap lansia, anak-anak serta difabel/ penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.



Gambar 1.1 Pencapaian Indikator AHH

Deskripsi situasi pencapaian indikator kesehatan yang dijabarkan dalam Gambar Pencapaian Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) di DIY selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017, tercatat angka harapan hidup di DIY adalah 74,74 tahun, melampaui angka harapan hidup pada tahun 2016 sebesar 74,71 tahun. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2018 AHH di DIY adalah 74,82 sedangkan di tahun 2019 mencapai 74.92, dan di tahun 2020 mencapai 74.99. Kematian dipengaruhi oleh keberadaan penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular termasuk kecelakaan serta perilaku berbahaya seperti konsumsi narkoba. Selain itu tahun 2020 kematian juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19.

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kesehatan, tersusun oleh beberapa program yang pada prinsipnya merupakan penggambaran dari upaya pelayanan komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif). Upaya tersebut khususnya diberikan penekanan kepada upaya penanganan permasalahan pokok tanpa mengabaikan upaya-upaya lainnya. Permasalahan pokok dimaksud adalah kesehatan ibu, bayi, anak, penyakit tidak menular dan menular, gizi, kejadian luar biasa, kondisi kedaruratan dan bencana, perilaku sehat dan lingkungan sehat.

Upaya memberikan pelayanan yang optimal perlu didukung oleh penyediaan sumberdaya memadai yang terdiri sarana prasarana, sediaan farmasi, dan pembiayaan kesehatan yang memadai khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Keseluruhan upaya pelayanan dan penyediaan pelayanan perlu dikelola dan didukung kebijakan, manajemen dan administrasi yang memadai pula. Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), khususnya untuk tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah



pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indikator kinerja beserta rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

## 1.2 Landasan Hukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 1.2.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 1.2.5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- 1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 1.2.1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY
- 1.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005-2025
- 1.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- 1.2.4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah DIY tahun 2018 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah DIY Nomor 3)
- 1.2.5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- 1.2.6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 tahun 2021 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 tanggal 29 Juni 2021

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan dokumen resmi yang memuat program dan kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2022. Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 ini adalah sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2017-2022, yang selanjutnya disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2022. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan 2022 juga menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 ini adalah agar perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2022, lebih terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### BAB IV. PENUTUP

## BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2020.

Keberhasilan Dinas Kesehatan DIY Tahun 2020 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2017 – 2022. Renstra Dinas Kesehatan DIY merupakan dokumen yang berisikan hasil pemikiran dan komitmen bersama Dinas Kesehatan DIY dengan berbasiskan data, asumsi-asumsi, analisis serta pendekatan metodologi yang tepat. Dari keseluruhan proses tersebut menghasilkan dokumen rencana strategis yang memuat visi dan misi Gubernur DIY, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran. Selanjutnya renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja OPD atau Renja OPD seperti saat ini melalui penyusunan Renja 2022. Namun demikian, Renstra telah mengalami perubahan dengan mengakomodasi pada perubahan organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat pada tabel berikut 2.1 berikut:

**Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

Lembar : .....

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat at Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
	Bidang Urusan Kesehatan									
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Balita Sehat	41.22%	44.13%	40,06%	40,62%	101,40	40.64%	n/a	n/a
		Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri	58.21%	68.6%	54.66%	76,7%	140,32	56.43%	n/a	n/a
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penurunan Persentase Balita Kurus	0.4%	0.1%	0.2%	0.3%	150	0.3%	n/a	n/a
		Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)	1%	0.25%	0.5%	0.28%	56	0.75%	n/a	n/a
		Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)	77%	88.25%	75%	77.52	115,87	76%	n/a	n/a

				Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	89%	88.73%	87%	87.46%	107,01%	88%	n/a	n/a
				Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM	22.8	13.7	13.7	47,94	349,9	22.8	n/a	n/a
				Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat	96	90	92	93,4	101,52%	94%	n/a	n/a
				Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri	51.14	48.86	49.77	54.66	109,82%	50.46%	n/a	n/a
				Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas	100	29.75	60.33	85,95	142,46	80.17	n/a	n/a
				persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.84	70.43	58.92	59.12%	100.33%	61.26%	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I	95	90.65	92.05	93.2%	101.25%	92.05%	n/a	n/a



				Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	100	100	100	100	100%	n/a	n/a
				Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	n/a	n/a
				Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%	100	40	60	80	100	80%	n/a	n/a
				Persentase Cakupan penemuan TB	40	34	36	36	100	38%	n/a	n/a
				persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV	72	66	68	87.4	128.53	70%	n/a	n/a
				Annual Parasite Incidence	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil	n/a	n/a
				persentase PJPD ditemukan	17.5%	10	12.5	12.5	100	15%	n/a	n/a
				persentase kasus jiwa diketemukan	17.5%	10	12.5	12.5	100	15%	n/a	n/a
				persentase DM diketemukan	17.5%	10	12.5	12.5	100	15%	n/a	n/a
				Persentase Kanker diketemukan	100	3	4	4	100	5%	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan	54.85	44.02	48.08	44,47	92,49	52.37%	n/a	n/a
				Lainnya sesuai Standar Pelayanan							n/a	n/a

		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan	245/243	182/262	192/213	197/262	8/262	234/232	n/a	n/a
			FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.	237	172	204	8	8	236	n/a	n/a
			persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
		Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100	80.19	51.2	62.32	62.32	100	71.98	n/a	n/a
		Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompeensi teknis SDM tingkat daerah provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana	85.71	82.65	83.67	84.36	100.82	84.69	n/a	n/a
		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai Standar	86.48	73.14	76.79	73.57	95.81	81.07	n/a	n/a
		1.Kegiatan : Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan 2.kegiatan Penerbitan izin	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian	287	236	256	256	100	275	n/a	n/a

			usaha kecil tradisional(UKOT)	2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat	75	60	65	60	95.31	70	n/a	n/a
				3 . Ketersediaan Obat	137	133	135	135	100	137	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan Masyarakat	15	11	13	13	100	14	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat	1	1	2	2	100	2	n/a	n/a
			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	68	78.46	64	87,8	137,18	66	n/a	n/a
			Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM tingkat daerah provinsi	Jumlah pelatihan yang dievaluasi	6	3	4	4	100	5	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Penduduk	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan							n/a	n/a

				Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan	26	22	24	25	104,2	25	n/a	n/a
				Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses Masyarakat	100	84.62	92.31	92.31	100	96.15	n/a	n/a
				Cakupan Jamkes Penyangga	100	98	100	100	100	100	n/a	n/a
				Cakupan Jamkes Preventif	12	6	8	8	100	10	n/a	n/a
				Cakupan Jamkes Rehabilitatif	25	10	15	15	100	20	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)	90%	97.38	88	88	100	89	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi	1%	0	3	3	100	2	n/a	n/a
				Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi $\leq 30$ menit	90%	83.55	86	86	100	88	n/a	n/a
				Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun	80	79.88	75	75	100	78	n/a	n/a
				Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa $\leq 60$ menit	75	64.66	69	69	100	72	n/a	n/a
				Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)	65%	48.74	62	62	100	64	n/a	n/a

				Penyelesaian Berkas pengajuan klaim pasien jaminan kesehatan	80%	77	78	78	100	79	n/a	n/a
				Penyusunan laporan tahunan rumah sakit	85%	85	83	83	100	84	n/a	n/a
				Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja	90%	85.88	88	88	100	89	n/a	n/a
				Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit	100%	80	90	90	100	95	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb: 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB	86%	84.87	84	84	100	85%	n/a	n/a
				Indikator 2: Angka kematian pasien $\geq$ 48 Jam	1%	0.76	1.5%	1.5	100	1%	n/a	n/a

				Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari	80 orang	142	80 orang	80	100	80 org	n/a	n/a
				Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR)	60%	45.91	60%	60	100	60%	n/a	n/a
				Indikator 5: Lenght of Stay (LOS)	5%	2.89	5 hari	5	100	5 hari	n/a	n/a
			Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKm dan UK Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung k keberhasilan pengobatan pasien (81,1%)	100%	100	100	100	100	100	n/a	n/a
			SPM	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a
				Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan DIY sesuai Bab III Pasal 5, adalah sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus, mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain;
- e. penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- f. pengelolaan sumber daya kesehatan;
- g. pengembangan upaya kesehatan tradisional;
- h. pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;
- i. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 87 tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Rumah Sakit Jiwa Grhasia, Rumah Sakit Paru Respira, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Balai Pelatihan Kesehatan, dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Indikator 1: Persentase Balita Sehat			38.94%	39.48%	40.06%	40.64%	41.22%	38.94%	40.75%	40,62%	40.64%	41.22%
	Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri			25.91%	52.83%	54.66%	56.43%	58.21%	25.91%	68.6%	76,7%	56.43%	58.21%
	Penurunan Persentase Balita Kurus			0.05%	0.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.05%	0.1%	0.3%	0.3%	0.4%
	Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)			0.125	0.25%	0.5%	0.75%	1%	0.125	0.25	0.28%	0.75%	1%
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)			73%	74%	75%	76%	77%	73%	74%	77.52	76%	77%
	Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)			85%	86%	87%	88%	89%	85%	86%	87.46%	88%	89%
	Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM			9.1%	13.7%	18.3%	22.8%	22.8%	9.1%	13.7%	47,94	22.8%	22.8%
	Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat			88%	90%	92%	94%	96%	92.2%	90%	93,4	94%	96%
	Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri			48.17%	48.86%	49.77%	50.46%	51.14%	50%	48.86%	54.66	50.46%	51.14%
	Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas			9.92	29.75	60.33	80.17	100	9.92%	29.75%	85,95	80.17	100
	persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD			9.92	100	100	100	100	9.92	100	100	100	100

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular			53.58%	56.33%	58.92%	61.26%	62.84%	53.58%	70.43%	59.12	61.26%	62.84%
	Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I			89.3%	90.65%	92.05%	92.05%	93.4%	89.3%	90.65%	93.2	92.05%	93.4%
	Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit Klinis			<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000	<1 per 100.000
	Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%			20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	80%	80%	100%
	Persentase Cakupan penemuan TB			32%	34%	36%	38%	40%	36%	34%	36%	38%	40%
	persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV			64%	66%	68%	70%	72%	64%	66%	87.4	70%	72%
	Annual Parasite Incidence			< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 Permil	< 1 permil	< 1 permil	< 1 permil
	persentase PJPD ditemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	persentase kasus jiwa diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	persentase DM diketemukan			7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%	7.5%	10%	12.5%	15%	17.5%
	Persentase Kanker diketemukan			2%	3%	4%	5%	5%	3%	3%	4%	5%	5%
	Indikator: Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan			38.37%	41.08%	48.08%	52.37%	54.85%	38.37%	44.02%	44.47%	52.37%	54.85%

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan			75/170	141/182	192/213	234/232	245/243	75/170	182/262	197/262	234/232	245/243
	FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.			120	172	204	236	237	120	120	8	236	237
	persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100			40.58	50.24	62.32	71.98	80.19	40.58	51.2	62.32	71.98	80.19
	Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar			66.92	72.05	76.79	81.07	86.48	66.92	73.14	73.57	81.07	86.48
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana			70.92	82.65	83.67	84.69	85.71	70.92	82.65	84.36	84.69	85.71
	1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian			215	236	256	275	287	215	236	256	275	287
	2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat			55	60	65	70	75	55	60	60	70	75
	3 . Ketersediaan Obat			130	133	135	137	137	130	133	135	137	137
	Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat			9	11	13	14	15	9	11	13	14	15
	Indikator : Jumlah layanan			1	2	2	2	2	1	1	2	2	2

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat												
	Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya			60	62	64	66	68	60	78.46	87.8	66	68
	Jumlah pelatihan yang dievaluasi			2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
	Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan			20	22	24	25	26	20	22	25	25	26
	Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat			76.92	84.62	92.31	96.15	100	76.92	84.62	92.31	96.15	100
	Cakupan Jamkes Penyangga			96	98	100	100	100	96	98	100	100	100
	Cakupan Jamkes Preventif			4	6	8	10	12	4	6	8	10	12
	Cakupan Jamkes Rehabilitatif			5	10	15	20	25	5	10	15	20	25
	Indikator 1: Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)			86	87	88	89	90	91.46	97.38	88	89	90
	Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi			7	4	3	2	1	0	0	3	2	1
	Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi $\leq 30$ menit			82	84	86	88	90	81.97	83.55	86	88	90

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
	Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun			70	72	75	78	89	102	79.88	75	78	89
	Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa ≤ 60 menit			63	66	69	72	75	42	64.66	69	72	75
	Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)			58	60	62	64	65	49.29	48.74	62	64	65
	Penyelesaian Berkas pengajuan klain pasien jaminan kesehatan			76	77	78	79	80	77	77	78	79	80
	Penyusunan laporan tahunan rumah sakit			81	82	83	84	85	85	85	83	84	85
	Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja			86	87	88	89	90	80.3	85.88	88	89	90
	Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit			70	80	90	95	100	70	80	90	95	100
	Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb : 1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB			82%	83%	84%	85%	86%	82%	84.87%	84.87%	85%	86%
	Indikator 2: Angka kematian			2.5%	2%	1.5%	1%	1%	0.7%	0.76%	1.5	1%	1%



[illegible]

Hasil evaluasi 2020 terhadap sasaran strategis, didapatkan bahwa semua sasaran strategis Dinas Kesehatan DIY tercapai, bahkan dua diantaranya pencapaiannya melampaui 100%. Secara detail, capaian indikator Dinas Kesehatan DIY 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-3. Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya perilaku sadar sehat	1 Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100
2	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	2 Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	69.08	75.19	108,84
3	Pelayanan kesehatan jiwa yang bermutu	3 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	65	81,39	125,215
4	Pelayanan kesehatan Paru yang bermutu	4 Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan*	%	77.2	77.2	100

Catatan: \* Kesehatan Paru

1. Terwujudnya Perilaku Sadar Sehat

Kinerja sasaran Perilaku Sadar Sehat diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Sumber data diolah dari hasil evaluasi puskesmas yang mengimplementasikan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) dibagi jumlah seluruh puskesmas di DIY.

Sasaran terwujudnya Perilaku Sadar Sehat didukung oleh dua program yakni program kesehatan masyarakat serta program pencegahan dan pengendalian penyakit. Hasil pendataan puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga akan dipakai sebagai intervensi sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu berbagai upaya penurunan angka penyakit terus dilakukan.

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Indikator ini juga mengakomodasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Program ini bertujuan meningkatkan akses keluarga berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga terdiri atas 4 (empat) area prioritas yang meliputi:

- penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*);

- c. penanggulangan penyakit menular; dan
- d. penanggulangan penyakit tidak menular.

Selain itu, pemilihan indikator ini juga mengacu pada kebijakan Gubernur DIY tentang Rencana Aksi Daerah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Yogyakarta Sehat Lestari melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 44 Tahun 2017. Yogyakarta Sehat Lestari adalah kondisi kesehatan yang dicita-citakan warga Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana perilaku sehat, peri kehidupan sehat, penerapan norma dan nilai hidup sehat, akan menjadi budaya yang melekat di dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Puskesmas adalah elemen utama. Tujuan PISPK adalah memperkuat fungsi Puskesmas dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) di tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan:

- a. melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga;
- b. membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas;
- c. menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas;
- d. melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan
- f. melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas.

Tujuan akhir target puskesmas yang melaksanakan PIS PK adalah tercapainya Indikator Keluarga Sehat (IKS). Parameter keluarga dianggap sehat jika terpenuhi:

1. keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3. bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9. anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. keluarga mempunyai akses sarana air bersih; dan
12. keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil pendataan PISPK diinput langsung dalam aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan melalui <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>. Namun hasil pendataan belum semua dapat dikembalikan kedaerah untuk dapat dimanfaatkan. Masih ada data yang diproteksi oleh Kementerian Kesehatan sehingga hasilnya belum diketahui. Berikut adalah hasil yang sudah dapat diakses oleh puskesmas diwilayah DIY:

NO	INDIKATOR	% CAKUPAN DIY
1	Keluarga mengikuti program KB	39.62
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	96.59
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	97.52
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	90.26
5	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	30.72
6	Penderita hipertensi yang berobat teratur	20.5
7	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	31.56
8	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	74.42
9	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	93.89
10	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	96.79

Sumber <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>

Gambar 2.1. Indikator Keluarga Sehat

Beberapa catatan terkait data diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk TB, masih ada yang melewati prosedur pemeriksaan yang seharusnya sehingga ada yang tidak terkonfirmasi pemeriksaan bakteriologi sebelumnya.
- Hipertensi umumnya masih dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan penyakit yang mengancam. Sehingga banyak penderita yang enggan melakukan pengobatan secara teratur.
- Hal yang sama juga terjadi pada penderita gangguan jiwa. Pengobatan baru dilakukan ketika dirasakan mengancam keselamatan anggota keluarga lain atau mengganggu lingkungan sekitar.
- Terkait indikator tentang merokok, angka merokok masih tinggi. Namun kesadaran untuk tidak merokok didalam rumah mulai nampak.
- Indikator yang terkait JKN, KB dan Kesehatan Lingkungan

*Universal Health Coverage* (UHC) merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Cakupan universal mengandung dua elemen inti yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, dan perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Pada grafik ini terlihat bahwa sebagian masyarakat sudah menjadi anggota JKN. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang enggan mendaftar secara mandiri. Disisi lain untuk PBI masih ada persoalan pada pendataan. Ada masyarakat miskin namun tidak terdaftar sebagai PBI dan sebaliknya ada masyarakat yang secara ekonomi mampu mendaftar secara mandiri namun malah masuk sebagai PBI. Pada proses transisi ini, DIY masih menyediakan pembiayaan melalui Bapel Jamkessos untuk masyarakat miskin yang tidak dibiayai oleh BPJS dan juga kasus khusus sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 63 tahun 2016. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di DIY dengan penerapan fungsi pendampingan melalui program Jamkes Penyangga dan pengembangan komplemen JKN dengan Jamkes Preventif dan Rehabilitatif.

- Di DIY sebagian besar keluarga telah memiliki akses penggunaan sarana air bersih. Di beberapa tempat masih ada masyarakat yang belum memiliki akses terkait faktor geografi (Di wilayah Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan juga kondisi ekonomi yang tidak mampu membeli air bersih. Untuk Jamban sehat, di beberapa lokasi masyarakat masih memakai jamban yang dikategorikan sebagai jamban sehat semi permanen dan juga jamban *sharing*. Ini juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan faktor geografis yang sulit mengakses air bersih.

Faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung percepatan pelaksanaan PISPK oleh puskesmas. Dukungan dana ini memacu persiapan untuk pelaksanaan PISPK menjadi jauh lebih cepat.
2. Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PISPK serta mengkomunikasikan persoalan teknis ke pusat.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan tenaga enumerator dalam pelaksanaan pendataan PISPK dengan cakupan penduduk di DIY. Tenaga di Puskesmas tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus didata.
2. Responden kurang kooperatif dengan menyembunyikan fakta fakta masalah kesehatan yang dialami dan sebagian sulit ditemui. Ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya adalah rasa malu, melihat itu sebagai hal pribadi dan rahasia dan juga karena kesibukan
3. Data yang sudah dientry melalui aplikasi kepusat (Kementerian Kesehatan) tidak bisa sepenuhnya kembali ke puskesmas karena proteksi data oleh Kementerian Kesehatan.
4. Intervensi terkait temuan temuan yang didapatkan dilapangan

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Peningkatan Kompetensi tenaga surveyor terutama kemampuan menggali data, memverifikasi dan melakukan observasi. Mengantisipasi kemungkinan ada informasi data yang tidak benar dari responden
2. Perekrutan tenaga enumerator yang berasal dari Non PNS untuk mempercepat proses pendataan
3. Mengkomunikasikan kebijakan pendataan PISPK dan pemanfaatannya bagi daerah dengan Kementerian Kesehatan

## 2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran **Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu** diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Bermutu. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tingkat lanjut (FKTL) dan pelayanan kesehatan lain yang sudah terakreditasi dibagi seluruh FKTP/FKTL dan Fasilitas Kesehatan Lain dikali 100

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan indikator Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Sasaran	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%) Target
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	67,18	69,08	75,19	108,84	67,18	69,08

Berdasar Peraturan Menteri Kesehatan No 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi, bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh, berjenjang dan terpadu.

Salah satu cara untuk menilai mutu dan kualitas pelayanan puskesmas dilakukan dengan akreditasi. Dengan implementasi standar akreditasi akan menjamin manajemen puskesmas, penyelenggaraan program kesehatan, dan pelayanan klinis telah dilakukan secara berkesinambungan. Indikator ini dipilih karena akreditasi menjadi bagian dari sebuah penjaminan mutu pelayanan di sektor kesehatan. Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Peraturan tentang akreditasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Bahwa Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara berkala paling sedikit tiga tahun sekali, demikian juga akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Tujuan utama akreditasi Puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu, kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan dan program, serta penerapan manajemen risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi. Pendekatan yang dipakai dalam akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.

Dalam upaya ini, Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan telah melaksanakan pendampingan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung proses akreditasi. Juga dukungan melalui workshop, pertemuan koordinasi, sosialisasi instrumen untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya proses akreditasi untuk dilakukan.

**Tabel 2.6 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terdampangi Akreditasi**

<b>Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>	<b>Jumlah FKTP/FKTL</b>	<b>Jumlah FKTP/FKTL Yang Terdampangi Akreditasi</b>
Puskesmas	121	121
RS	78	65

*Sumber : Seksi Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain*

Beberapa faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Regulasi PMK Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.
2. Regulasi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi. Regulasi tersebut diikuti dengan pembuatan petunjuk teknis akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi, pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY dan kabupaten/kota.
3. Peran serta surveyor lokal dengan memberikan asistensi bagi puskesmas yang membutuhkan pendampingan
4. Sosialisasi, bimbingan teknis akreditasi oleh Dinas Kesehatan DIY Provinsi dan Kabupaten/Kota, penguatan komitmen seluruh tenaga Puskesmas , pemenuhan anggaran pendampingan dan akreditasi Puskesmas yang berasal dari DAK non fisik serta validasi data sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sebelum di *entry* ke dalam aplikasi ASPAK.
5. Ketersediaan SDM Kefarmasian dan kepatuhan dalam mengimplementasikan standar dan pedoman. sarana telah memenuhi standar sarpras, perijinan, SDM melalui upaya koordinasi dengan BKD provinsi dan kabupaten/kota untuk pemenuhan SDM sesuai perencanaan kebutuhan, bimtek terpadu RS, bimtek dengan penekanan pada faskes yang dibawah standar, koordinasi dengan kabupaten/kota dengan gerai terpadu perijinan
6. Dukungan regulasi Permenkes nomor 33 tahun 2015 tentang Analisis Beban Kerja, Permenkes nomor 75 tentang Puskesmas, Permenkes tentang 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan RS, permenkes nomor 9 tahun 2014
7. Balai Laboratorium Kesehatan terus mengembangkan pelayanan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium.
8. Bapelkes mengembangkan Pelatihan yang dievaluasi sehingga semua mantan linatih harus menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang didapat saat pelatihan di instansinya masing masing



9. Jumlah masyarakat miskin terbiayai jaminan kesehatan sesuai dengan kriteria sebesar 100%.

Tantangan yang masih harus diselesaikan adalah sebagai berikut :

1. Masalah Ketenagaan masih menjadi masalah mendasar terutama bagi RS dalam melaksanakan akreditasi.
2. Mekanisme monitoring paska akreditasi belum berjalan optimal.
3. Tenaga Kesehatan yang mampu memenuhi syarat sebagaimana diminta dalam akreditasi masih terbatas. Ini berhubungan dengan Kemampuan penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang juga memiliki kapasitas terbatas
4. Ijin pengelolaan limbah medis juga menjadi kendala bagi Rumah Sakit dalam melaksanakan akreditasi
5. Data kepesertaan Jaminan Kesehatan dan kebijakannya

Strategi untuk pencapaian Target Berikutnya:

1. Pembinaan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) untuk mempertahankan penerapan standar mutu pelayanan, serta pembinaan lanjut bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum memenuhi standar mutu;
2. Mendorong RS untuk mampu melaksanakan rekrutmen tenaga yang dibutuhkan.
3. Meningkatkan kapasitas pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan
4. Membuat komitmen dan kerjasama dengan instansi terkait perijinan limbah
5. Melakukan Advokasi dengan BPJS

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga, ditetapkan sebagai salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan DIY disamping indikator pelayanan kesehatan yang bermutu. Indikator PHBS merupakan indikator komposit yang terdiri dari 10 indikator mencakup gambaran kesehatan individu dan rumah tangga, yaitu

- 1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
- 2) Memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif
- 3) Menimbang Balita setiap bulan
- 4) Menggunakan air bersih
- 5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- 6) Menggunakan jamban sehat
- 7) Memberantas jentik dirumah seminggu sekali
- 8) Makan sayur dan buah setiap hari
- 9) Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- 10) Tidak merokok di dalam rumah

### 3. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa Hasil Jumlah indikator mutu yang dicapai sebagai berikut:

Tabel 2-7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu	persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah indikator mutu yang dicapai dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikali 100%

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Jiwa yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-8 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Sasaran	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	60	65	81,39	125,215	75	108,52

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai 125,215%
2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 3,49%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Capaian kinerja dapat kita lihat pada tingkat pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia DIY. Sehubungan dengan masih berprosesnya usulan rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia yang baru, maka untuk tahun 2020 Standar Pelayanan Minimal RS Jiwa Grhasia masih menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009. Pencapaian SPM telah dapat dicapai di 2019 dan yang di tahun kemarin belum tercapai dan dievaluasi sampai akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-9 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Jiwa Grhasia Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Uraian Indikator	Target	Realisasi		Tercapai
				2019	2020	
1	Pelayanan Kegawatdaruratan	Jam buka pelayanan Gawat Darurat 24 jam	100%	100%	100%	Tercapai
2		Pemberi pelayanan kegawatdaruratan bersertifikat ACLS/PPGD/GELS	100%	73,92%	72,70%	Tidak tercapai
3		Waktu untuk mendapatkan pelayanan medis ≤ 45 menit	≥ 95%	100%	100%	Tercapai
4		Kesesuaian diagnosis dan terapi	≥ 90%	100%	100%	Tercapai

5		Kepuasan pelanggan	80%	81,00%	85,71%	Tercapai
6	Pelayanan Rawat Jalan	Pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100%	100%	100%	Tercapai
7		Ketersediaan pelayanan	a. Klinik Psikologi b. Klinik Anak c. Klinik Penyakit Dalam d. Klinik Saraf e. Klinik Kulit dan Kelamin f. Klinik Gigi dan Mulut	a. Klinik Psikologi b. Klinik Anak c. Klinik Penyakit Dalam d. Klinik Saraf e. Klinik gigi dan mulut	a. Klinik Psikologi b. Klinik Anak c. Klinik Penyakit Dalam d. Klinik Saraf e. Klinik gigi dan mulut	Tidak tercapai
8		Ketersediaan Pelayanan di RS Jiwa	a. Anak Remaja b. Napza c. Psikotik d. Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut	a. Anak Remaja b. Napza c. Psikotik d. Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut	a. Anak Remaja b. Napza c. Psikotik d. Neurotik e. Mental Retardasi f. Mental Organik g. Usia Lanjut	Tercapai
9		Jam Buka Pelayanan	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat (08.00 s/d 11.00)	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat (08.00 s/d 11.00)	08.00 s/d 13.00 setiap hari kerja kecuali jumat (08.00 s/d 11.00)	Tercapai
10		Waktu Tunggu Rawat Jalan	15 menit	37 menit	30 menit	Tidak tercapai
11		Sterilisasi Alat Gigi	> 95 %	100%	100%	Tercapai
12		Kesesuaian diagnosis dengan terapi	> 95 %	100%	100%	Tercapai
13		Kepuasan Pelanggan	> 90 %	80%	98,96%	Tercapai
14	Pelayanan Rawat Inap	Kepuasan Pelanggan	90%	84,34%	90,67%	Tercapai
15		Kelengkapan dokumen Askep	90%	99,47%	97,41%	Tercapai
16		Kesesuaian diagnosis dengan terapi	100%	100%	100%	Tercapai
17		Infeksi Nosokomial	≤ 5%	0,95%	0,93%	Tercapai
18	Pelayanan Rawat Psikiatri Intensif	Penanganan pasien gaduh gelisah ≤ 48 jam	80%	72,53%	82,61%	Tercapai
19		Lama hari perawatan pasien di UPI ≤ 1 minggu	80%	83,03%	86,26%	Tercapai
20	Elektromedik	Waktu layanan EKG ≤ 10 menit	98%	99%	100%	Tercapai
21		Waktu layanan fisioterapi ≤ 30 menit	90%	95%	94,50%	Tercapai
22		Waktu layanan ECT ≤ 30 menit	80%	belum ada pelayanan ECT	belum ada pelayanan ECT	-
23		Waktu layanan Treadmill ≤ 45 menit	80%	tidak ada pelayanan treadmill	tidak ada pelayanan treadmill	-
24	Radiologi	Waktu tunggu hasil radiologis ≤ 60 menit	100%	98,63%	99,57%	Tercapai
25		Kegagalan pemotretan	≤ 10%	0,89%	0,06%	Tercapai
26		Kepuasan Pelanggan	80%	82,70%	84,79%	Tercapai
27	Lab. Patologi Klinik	Waktu Tunggu layanan pemeriksaan laboratorium general check up 3 jam	98%	99%	100%	Tercapai
28		Ketepatan pengukuran terhadap serum kontrol	90%	95,42%	96,33%	Tercapai

29		Keberhasilan pengambilan darah vena dengan <i>vacutainer</i>	90%	98,04%	99,37%	Tercapai
30		Kesalahan Pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	0%	0%	0%	Tercapai
31		Kepuasan pelanggan	≥ 90%	79,82%	90,67%	Tercapai
32	Rehabilitasi Mental	Rehabilitasi mendapatkan kegiatan sesuai hasil seleksi	95%	97,17%	95,92%	Tercapai
33	Farmasi	Waktu layanan obat jadi rawat jalan ≤ 10 menit	90%	100%	85,37%	Tidak tercapai
34		Waktu layanan obat racikan untuk 30 kapsul/bungkus pasien rawat ≤ 30 menit	90%	100%	80,64%	Tidak tercapai
35		Kejadian kesalahan pemberian obat	0%	0,00%	0,04%	Tidak tercapai
36		Kepuasan pelanggan	90%	95%	96,62%	Tercapai
37	Gizi	Peningkatan status gizi	≥ 80%	91,11%	92,12%	Tercapai
38		Makanan terdistribusi dengan benar	≥ 90%	99,78%	100%	Tercapai
39		Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	90%	99,78%	100%	Tercapai
40		Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	20%	8,93%	9,23%	Tercapai
41		Kejadian kesalahan pemberian diet	0%	0%	0%	Tercapai
42	Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah kehadiran tim integrasi di Puskesmas mitra dalam 1 tahun	100%	Kegiatan sudah tidak dilaksanakan	Kegiatan sudah tidak dilaksanakan	-
43	Catatan Medik (CM)	Kelengkapan pengisian rekam medik pasien rawat jalan 24 jam setelah selesai pelayanan	90%	95,04%	98,19%	Tercapai
44		Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap 3 x 24 jam setelah pasien pulang	80%	87,19%	78,60%	Tidak tercapai
45		Kehilangan status rekam medik pasien	0%	0%	0%	Tercapai
46		Waktu penyediaan rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit	95%	97,12%	98,08%	Tercapai
47		Waktu penyediaan rekam medik pelayanan rawat inap ≤ 15 menit	95%	40,19%	96,48%	Tercapai
48	IPSRS	Kecepatan perbaikan kerusakan ringan sarana umum dan sanitasi ≤ 3x24 jam	90%	99,41%	99,66%	Tercapai
49		Angka kuman E. Coli pada air bersih ≤ 10	90%	81,67%	100%	Tercapai
50		Pengangkut sampah non medis selesai ≤ 24 jam	80	100%	100%	Tercapai
51		Frekuensi pengontrolan saluran air limbah setiap hari	80%	100%	100%	Tercapai
52	Humas	Tamu melayani dengan baik dalam 15 menit	100%	100%	100%	Tercapai
53		Keluhan pelanggan diselesaikan dalam waktu ≤ 24 jam	98%	100%	100%	Tercapai
54	Diklat	Proses surat menurut diselesaikan dalam waktu ≤ 2 hari	90%	95%	95%	Tercapai

55	Laundry	Kehilangan Linen	0%	0%	0%	Tercapai
56		Ketepatan waktu pencucian linen ≤ 24 jam	90%	100%	100%	Tercapai
57	Sekuriti	Keamanan di lingkungan Rumah Sakit dengan tingkat kehilangan 0%	100%	100%	100%	Tercapai
58	Mutu Layanan	Emergency response time rate	100%	100%	75,90%	Tidak tercapai
59		Waktu tunggu sebelum tindakan psikoterapi dan detoksifikasi	< 2 hari	1 hari	1 hari	Tercapai
60		LOS	≤ 42 hr	28 hr	23 hr	Tercapai
61	Mutu Klinik	Angka pasien lari gawat darurat	≤ 2%	0%	0%	Tercapai
62		Angka kejadian infeksi HAIs di ruang rawat inap	< 5 %	0,00%	0,93%	Tercapai
63	Kepedulian Kepada Masyarakat	Rasio TT Kelas III	20-30%	22%	23%	Tercapai
64		Penyuluhan kesehatan (kesehatan, tatib dan peraturan RS)	1 program	tidak ada	1 program	Tercapai
65	Kepuasan Pelanggan	Survei Kepuasan Pasien menggunakan IKM (tahunan)	≥75%	80,42%	81,80%	Tercapai
66		Penanganan pengaduan/komplain	70%	82%	100%	Tercapai
67	Pertumbuhan Produktivitas	Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan	≥ 0,90	2%	0,70%	Tidak tercapai
68		Pertumbuhan rata-rata kunjungan gawat darurat	≥ 0,90		0,99	Tercapai
69		Pertumbuhan hari perawatan rawat inap	≥ 0,90	0.05%	0,99	Tercapai
70		Pertumbuhan rehabilitasi medik	≥ 1.1%	1.5%	1%	Tercapai
71	Efektivitas Pelayanan	Pelaporan BOR/Tingkat Penggunaan Tempat Tidur	60-80%	43%	49,25%	Tidak tercapai
72		Angka pembatalan tindakan psikoterapi dan tindakan detoksifikasi	<1%	0%	0%	Tercapai
73		Pengulangan pemeriksaan laboratorium	< 10%	5%	0,21%	Tercapai
74	Pertumbuhan Pembelanjaran	Program reward dan punishment	Ada	Ada	Ada	Tercapai
75		Rata-rata jam pelatihan karyawan 20 jam	20%	22%	41,20%	Tercapai
76	Rasio Keuangan	Rasio pendapatan BNPB terhadap biaya operasional (PB) / triwulan	44%	44%	42%	Tercapai
77		Rasio Kas (Cash Ratio) tahunan	≤300%	10215%	4817%	Tidak tercapai
78		Rasio Lancar (Current Ratio) tahunan	>600%	15742%	5966%	Tercapai
79		PPP (Collecting Periode) periode penagihan piutang / tahunan	<30 hari	79 hari	25 hari	Tercapai
80		Perputaran AT (Fixed Asset Turnover) tahunan	>20%	34%	33%	Tercapai
81		Imbalan AT (Return on FA) tahunan	>6%	-22%	-23%	Tidak tercapai
82		Imbalan Ekuitas (Return on Equity) tahunan	>8%	-34%	-21%	Tidak tercapai

83		Perputaran Persediaan (Inventory Turn over) tahunan	≤35 hari	28 hari	29 hari	Tercapai
84		Rasio Subsidi Biaya Pasien	≤15%		Tidak ada kegiatan	Tercapai
85	Kepatuhan Pengelolaan BLUD	Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap RBA Definitif	0,4		0,4	Tercapai
86		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap LK SAK tdk berlaku sejak PMK 220 th 2016 yg berlaku berdasar Standard Akutansi Pemerintahan	0,2		Tidak melakukan kegiatan	
87		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SP3B BLU	0,2	0,2	0,2	Tercapai
88		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Tarif Layanan	0,4	0,4	0,4	Tercapai
89		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Sistem Akuntansi	0,6	0,6	0,6	Tercapai
90		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap Persetujuan Rekening	0,1		0,1	Tercapai
91		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SOP Pengelolaan Kas	0,5		0,5	Tercapai
92		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SOP Pengelolaan Piutang	0,5	0,5	0,5	Tercapai
93		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SOP Pengelolaan Utang	0,5	0,5	0,5	Tercapai
94		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	0,5	0,5	Tercapai
95		Kepatuhan pengelolaan keuangan terhadap SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	0,5	0,5	Tercapai
96	kepedulian Terhadap Lingkungan	Proper lingkungan	100%		100%	Tercapai
97		Kebersihan lingkungan	100%		100,00%	Tercapai
98	Pelayanan Rawat Jalan	Jam Layanan pemeriksaan oleh psikiater dimulai tepat jam 08.30	90%	90,0%	90,3%	Tercapai
99		Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit	95%	51,0%	100,00%	Tercapai
100		Waktu tunggu layanan rawat jalan jiwa ≤ 60 menit	100%	100%	100,00%	Tercapai
101	Pelayanan Rawat Inap	Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri	0	0	0	Tercapai
102		Kejadian cedera karena jatuh (IL)	98%	97%	99,46%	Tercapai
103	Pelayanan Radiologi	Waktu tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	95%	100%	100%	Tercapai
104		Waktu tunggu hasil radiologi ≥ 3 jam (Thorax)	5%	98,63%	0,43%	Tercapai
105	Kepatuhan Terhadap Standar	Kepatuhan terhadap Clinical Pathway	≥80%	91,27%	91,10%	Tercapai
106		Kepatuhan penggunaan formularium nasional	90%	99,14%	99,22%	Tercapai
107		Prosentase kejadian pasien jatuh	0	0%	0%	Tercapai

108		Cidera/trauma fisik akibat fiksasi di unit pelayanan intensif psikiatri	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
109	Capaian Indikator Medik	Tidak adanya pasien yang dilakukan fiksasi selama > 24 jam di IRI	100%	100,00%	100%	Tercapai
110	Kepuasan Pelanggan	Kecepatan respon terhadap komplain	75%	76%	100%	Tercapai
111	Ketepatan Waktu Pelayanan	<i>Emergency Psychiatric Response Time</i> (EPRT)	100%	100%	100%	Tercapai
112		<i>Nett Death Rate</i> (NDR)	0%	0%	0%	Tercapai
113		Pengembalian rekam medis lengkap dalam waktu 24 jam	90%	68,88%	98,19%	Tercapai
114		<i>Nett Death Rate</i> (NDR)	0%	0%	0%	Tercapai
115		Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi untuk pasien rawat jalan ≤ 30 menit	90%	100,00%	85,37%	Tidak tercapai
116		Waktu tunggu hasil laboratorium < 140 menit untuk kimia darah dan darah lengkap	95%	80,00%	99,11%	Tercapai
117	Prioritas Indikator Area Manajemen	Kelengkapan rekam medis	100%	87,37%	98,19%	Tidak tercapai
118		Utilisasi alat BERA	10%	0	0%	Tidak tercapai
119		Angka peresepan polifarmasi	0%	0,32%	0,12%	Tidak tercapai
120		Angka ketersediaan obat dan alkes yang dibutuhkan untuk pelayanan resep	90%	98,80%	98,70%	Tercapai
121		Harapan dan kepuasan staf	70%	100%	81,18%	Tercapai
122		<i>Cost Recovery Rate</i> tiap triwulan	100%	100%	100,00%	Tercapai
123	Prioritas Sasaran Keselamatan Pasien	Angka kelengkapan form penandaan lokasi tindakan gigi	100%	tidak ada kasus	100%	Tercapai
124		Cidera karena jatuh	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
125		Angka pemasangan foto di lembar data sosial / identitas pasien ranap jiwa	100%	100%	98,44%	Tidak tercapai
126		Angka kelengkapan verifikasi perintah melalui telepon	100%	100%	100%	Tercapai
127		Angka kepatuhan petugas terhadap reassesmen resiko jatuh	100%	100%	100,00%	Tercapai
128		Angka pelabelan obat yang perlu diwaspadai (obat high alert)	100%	98,17%	100,00%	Tercapai
129	Prioritas Area Klinis	Tidak adanya pasien yang dilakukan isolasi selama 24 jam	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
130		Angka kejadian infeksi HAIs	0%	0%	0,93%	Tidak tercapai
131		Tidak adanya kejadian kesalahan penyiapan obat	100%	99,87%	99,96%	Tidak tercapai
132		Angka kerusakan sampel darah	0%	0,02%	0,05%	Tidak tercapai
133		Angka pemeriksaan ulang	<5%	0,89%	0,21%	Tercapai
134		Pelayanan pertama gawat darurat < 5 menit	100%	100%	75,90%	Tidak tercapai



135		Pendokumentasian asuhan keperawatan pasien rawat inap	≥ 90%	100%	95,49%	Tercapai
136		Kesesuaian data dengan diagnosis keperawatan	100%	100%	100%	Tercapai
137		Jumlah pasien rawat inap yang mengakses layanan psikologi meningkat 25% dari rerata tahun sebelumnya	100%	100%	100%	Tercapai
138		Tindakan ekstraksi gigi permanen ≤ 20% dari tindakan perawatan gigi yang dilakukan di klinik gigi	≤20%	60,47%	18,44%	Tercapai
139		Tidak ada kejadian cedera pada pasien	100%	99,87%	100,00%	Tercapai
140		Pendidikan Kesehatan pada Keluarga Pasien yang Baru Pertama Dirawat	100%	100%	100%	Tercapai
141		Angka fiksasi	70%	100%	99,65%	Tercapai
142		Kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan	30%	35%	97,41%	Tercapai
143		Pendidikan kesehatan	90%	99,82%	100%	Tercapai
144		Tidak ada kejadian pasien lari	80%	100%	99,66%	Tercapai
145		Tidak ada kejadian cedera pada pasien	> 95%	100%	99,46%	Tercapai
146		Waktu tunggu ≤ 15 menit	> 95 %	100%	100%	Tercapai
147		Rehabilitan yang mengikuti kegiatan okupasi terapi 6 kali berturut-turut layak naik ke level berikutnya	95%	97%	95,92%	Tercapai
148		Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain	60%	80%	Tidak ada	Tidak ada
149		Angka kehadiran petugas penyuluh	100%		Tidak ada	Tidak ada
150		Angka kehadiran Tim Integrasi di Puskesmas Mitra	100%		Tidak ada	Tidak ada
151		Angka kehadiran Psikiater ke PSBK	100%		Tidak ada	Tidak ada
152		Waktu layanan Okupasi Terapi ≤ 45 mnt	100%	100%	100%	Tercapai
153		Kejadian luka bakar pada tindakan heating	90%	100%	100%	Tercapai
154		Penulisan resep sesuai formularium	100%	100%	99%	Tidak tercapai
155		Kepuasan pelanggan	90%	99,25%	91,80%	Tercapai
156		Ketepatan pengukuran terhadap serum control (end point):	≥75%	78,22%	96,33%	Tercapai
157		Pelaporan nilai kritis mulai 2019	90%	95,42%	100,00%	Tercapai
158		Hasil Ketetapan Foto (tidak pengulangan)	0%	0%	0%	Tercapai
159		Ketepatan waktu pengembalian linen untuk Instalasi Rawat Inap	95%	100%	99%	Tercapai
160		Penyelesaian Pengangkutan Sampah Non Medis ≤ 1 x 24 jam	75%	100%	100%	Tercapai
161		Penyelesaian kerusakan ringan ≤ 24 jam	90%	100%	100%	Tercapai
162		Kehadiran Peserta Pelatihan	90%	100%	99,51%	Tercapai



163		Pelaksanaan Pelatihan sesuai dengan Perencanaan	100%	89,26%	100,00%	Tercapai
164		Jumlah barang/aset yang sudah diberi kode barang	100%	100%	100%	Tercapai
165		Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tepat waktu sesuai SPK	70%	70%	70%	Tercapai
166		Pegawai selesai diusulkan KGB nya tepat waktu dalam setiap bulannya	100%	100%	100%	Tercapai
167		Waktu layanan Penderita Rawat Inap 10 menit	100%	100%	100%	Tercapai
168		Waktu layanan Penderita Rawat Jalan 5 menit	100%	100%	100%	Tercapai
169		100% tenaga medis RSJ Grhasia sudah registrasi	100%	100%	96,15%	Tidak tercapai
170		Pelaksanaan tugas perawat pengawas tercapai	100%	100%	100%	Tercapai
171		Semua Perawat di RSJ Grhasia terlisensi	≥ 80%	100%	100%	Tercapai
172		Penanganan Kasus Etik Keperawatan	100%	100%	Tidak ada kasus	Tercapai

Indikator yang digunakan untuk penilaian IKU terdiri dari indikator yang ada di SPM RS Jiwa Grhasia (berdasarkan Pergub DIY no 25 tahun 2009 tentang SPM RS Jiwa Grhasia) dan indikator BLUD (berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan nomor 36 tahun 2016 tentang indikator kinerja BLUD). Faktor pendukung tercapai nya IKU RS Jiwa Grhasia adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

#### 4. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru Yang Bermutu

Tolok ukur capaian sasaran diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan.

Tabel 2-10 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
2	3	4
Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan	Jumlah indikator mutu yang memenuhi standar dibagi jumlah seluruh indikator mutu dikalikan 100

Kinerja sasaran Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang Bermutu dengan indikator Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Paru pada tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2-11 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Sasaran	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan	74,8	77,2	77,2	100	81,3	94,95

Analisis Ketercapaian Kinerja:

1. Persentase realisasi terhadap target tercapai 100%

2. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat kenaikan sebesar 2,4%. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai. Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran 1 dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Jiwa Grhasia sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

Pemenuhan standar mutu pelayanan berdasarkan pada capaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS Paru Respira sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Paru Respira. Adapun rincian indikator mutu yang memenuhi standar sebagai berikut:

**Tabel 2-12 Standar Mutu RS Paru Respira Memenuhi Standar Tahun 2020**

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH INDIKATOR	MEMENUHI STANDAR	
			Jumlah	%
1	Gawat darurat	8	8	100
2	Rawat Jalan	8	5	62,5
3	Rawat Inap	13	11	84,6
4	Radiologi	7	7	100
5	Lab.Patologi Klinik	9	9	100
6	Rehabilitasi Medik/Fisioterapi	5	5	100
7	Farmasi	7	5	71,4
8	Gizi	6	6	100
9	Rekam Medik	8	6	75
10	Pengelolaan Limbah	5	5	100
11	Administrasi dan Manajemen	16	13	81,3
12	Ambulans/Kereta Jenazah	7	6	85,7
13	Pemulasaran Jenazah	7	0	0
14	Pelayanan Pemeliharaan RS	5	3	60
15	Pelayanan Laundry	6	0	0
16	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	6	100
	<b>JUMLAH</b>	123	95	77,2

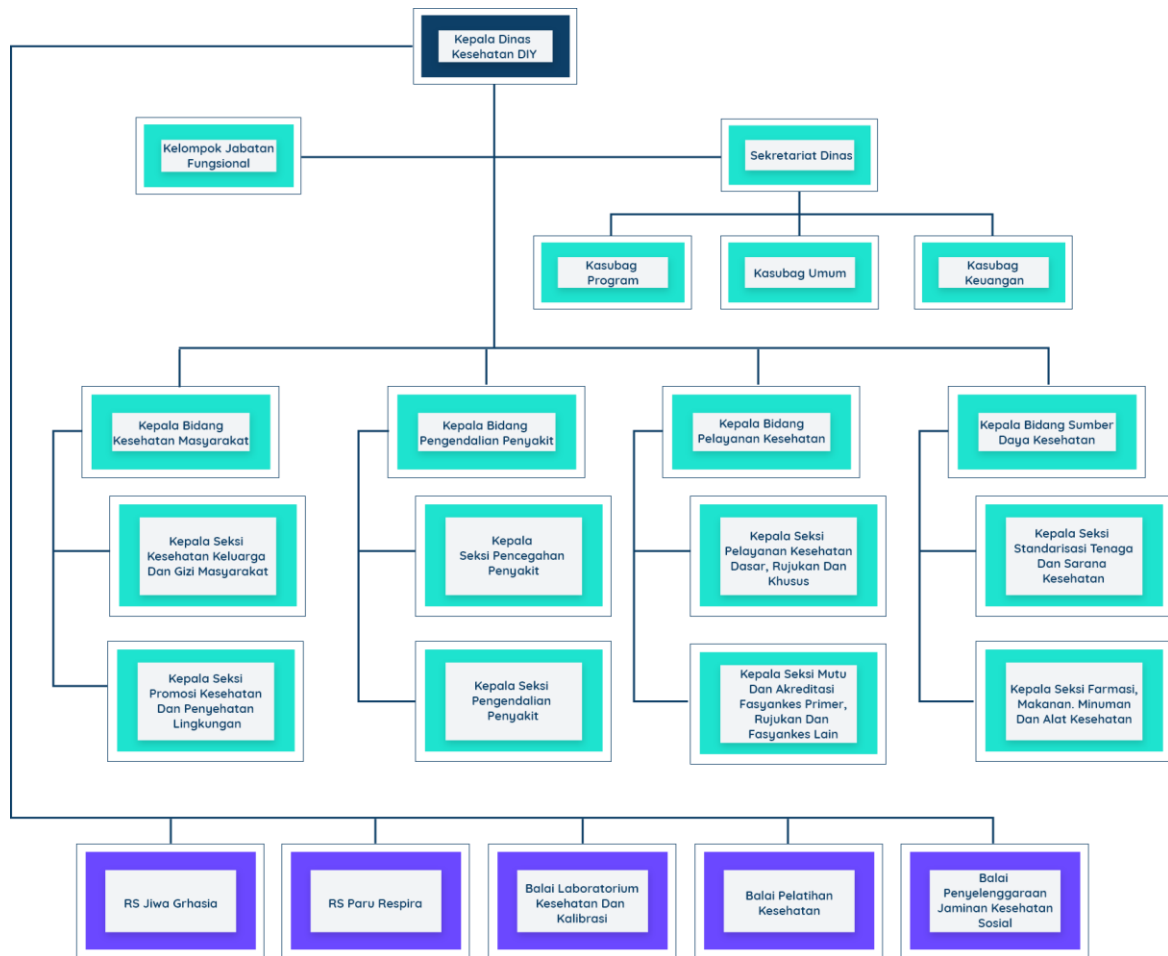
Sasaran Strategis RS Paru Respira tahun 2017-2022 adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paru yang bermutu dengan indikator Persentase pemenuhan Standar mutu Pelayanan. Faktor pendukung tercapainya adalah kerjasama yang baik antara seluruh pihak di RS Paru Respira sehingga standar mutu dapat dicapai dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan.

## 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi pembangunan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam Peningkatan Kualitas manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2020-2024 merupakan bagian dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

**Gambar 2.2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan**



Indikator pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
4. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan meningkatnya pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

Stategi Arah kebijakan RPJMN 2020-2024 bidang Kesehatan:

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
5. Penguatan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum menunjukkan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 4 isu yaitu :

1. Stunting
2. Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
4. Penguatan pelayanan kesehatan, pengawasan obat dan makanan

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2009-2029 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RT/RW Kabupaten Bantul 2010-2030, Dinkes DIY telah berupaya menyesuaikan dengan ketentuan RT/RW dimaksud dalam rangka mengembangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

a. Faktor Penghambat Pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan rujukan di RS adalah

- Rasio persebaran jumlah dan kelas rumah sakit yang belum merata terutama untuk kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo berimplikasi pada akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan rumah sakit
- Adanya kebijakan sistem regionalisasi rujukan sehingga berpengaruh pada kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit rujukan yang sesuai klasifikasi dan kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat

b. Faktor Pendorong Pelayanan

- sumber daya kesehatan
- Adanya desentralisasi bidang kesehatan
- Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan
- Adanya pembiayaan kesehatan
- Institusi pendidikan kesehatan yang memadai
- Masyarakat yang berdaya
- Kebijakan lokal sistem rujukan berbasis kompetensi

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 2-13. Tabel Target dan Capaian Kinerja 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	3	4	5	6	7
1	Persentase Puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	100	100	100
2	Persentase Pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	69.08	75.19	108,84
3	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan Kesehatan Jiwa	%	65	81,39	125,215
4	Persentase Pemenuhan Standar Mutu Pelayanan*	%	77.2	77.2	100

Catatan: \* Kesehatan Paru

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY, tidak dapat terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu pokok dan atau strategis tersebut yang menjadi masalah prioritas adalah:

- Gizi dan kesehatan ibu dan anak, yang meliputi *Stunting*, WUS KEK (Wanita Usia Subur Kekurangan Energi Kronik), Kematian Ibu, dan Kematian Bayi.
- Penyakit tidak menular yang meliputi *Diabetes* Melitus, PJP (Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah)/Hipertensi, Gangguan Jiwa, Kanker (Ca), dan Napza.
- Penyakit menular, yang meliputi HIV AIDS, Tuberkulosis, DBD, Pneumonia termasuk penyakit potensial KLB.
- Pelayanan kesehatan, yang meliputi akreditasi dan sumber daya manusia, termasuk kesiapan dalam penanganan bencana
- Pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan amanah keistimewaan

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2021.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta kebijakan. Review ini membantu memetakan selisih antara kebutuhan dengan rancangan awal RKPD.

Tabel 2-14 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY

Lembar : 1

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				54,059,792,317			128,534,954,723
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				43,677,999,917			49,286,839,523
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				78,650,000			78,650,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA 2.Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022 3.Pengembangan aplikasi/software /website pendukungkinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	1 Dok 1 Dok 1 Dok	72,261,000	1.Dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron antara PA dan KPA 2.Dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022 3.Pengembangan aplikasi/software /website pendukungkinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas DIY	1 Dok 1 Dok 1 Dok	72,261,000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen DPPA SKPD	1 dok	6,389,000	Dokumen DPPA SKPD	1 dok	6,389,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				41,236,745,146			46,847,694,752

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Gaji dan tunjangan ASN 2.Insentif nakes ASN	1 tahun 1352 orang bulan	41,231,553,146	1.Gaji dan tunjangan ASN 2.Insentif nakes ASN	1 tahun 1352 orang bulan	46,842,502,752
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.Laporan bulanan/Fungsional 2.Laporan Semester/Prognosis 3.Laporan tahunan SKPD	1.24 dokumen 2.1 dokumen 3.1 dokumen	5,192,000	1.Laporan bulanan/Fungsional 2.Laporan Semester/Prognosis 3.Laporan tahunan SKPD	1.24 dokumen 2.1 dokumen 3.1 dokumen	5,192,000
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>2,000,000</b>			<b>2,000,000</b>
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	pembayaran PBB	1 tahun	2,000,000	pembayaran PBB	1 tahun	2,000,000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>32,000,000</b>			<b>32,000,000</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Terselenggaranya SMM ISO 9001:2015	1 paket	32,000,000	Terselenggaranya SMM ISO 9001:2015	1 paket	32,000,000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>238,884,000</b>			<b>219,524,000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Alat listrik	1 Paket	2,224,000	Alat listrik	1 Paket	2,224,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	belanja ATK Laptop PC	1 paket 2 unit 2 unit	68,473,000	belanja ATK Laptop PC	1 paket 2 unit 2 unit	68,473,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Belanja alat kebersihan	1 paket	7,525,000	Belanja alat kebersihan	1 paket	7,525,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran	1 paket 1 paket	9,787,000	logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran	1 paket 1 paket	9,787,000



**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Belanja cetakan penggandaan	1 tahun 1 tahun	11,474,000	Belanja cetakan penggandaan	1 tahun 1 tahun	11,474,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Pembayaran layanan surat kabar	12 bln	4,056,000	Pembayaran layanan surat kabar	12 bln	4,056,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Belanja makan minum rapat Perjalanan Dinasluar daerah	2999 oh 1 tahun	135,345,000	Belanja makan minum rapat Perjalanan Dinasluar daerah	2999 oh 1 tahun	115,985,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1,580,937,771</b>			<b>1,598,187,771</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Belanja benda pos dan pengiriman surat	1 paket	1,700,000	Belanja benda pos dan pengiriman surat	1 paket	1,700,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Belanja telepon, air, listrik dan fax	1 tahun	488,317,090	Belanja telepon, air, listrik dan fax	1 tahun	488,317,090
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.Honorarium Pegawai 2.Honoror/PTT 3.Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi 4.Jasa Pestcontrol Pembayaran Honor Pengelola Keuangan 5.Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 6.Pembayaran Jasa Pengelola Kepegawaian 7.Pembayaran retribusi sampah	1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,090,920,681	1.Honorarium Pegawai 2.Honoror/PTT 3.Jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi 4.Jasa Pestcontrol Pembayaran Honor Pengelola Keuangan 5.Pembayaran Jasa Keamanan Kantor 6.Pembayaran Jasa Pengelola Kepegawaian 7.Pembayaran retribusi sampah	1 paket 12 bulan 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	1,108,170,681

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>508,783,000</b>			<b>508,783,000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.Kendaraan dinas sebanyak 23 unit roda 4 dan 27 unit roda 2 terpelihara 2.KIR R4 3.pembayaran STNK Roda 4 dan Roda2	1 tahun 2 kali 1 tahun	241,198,000	1.Kendaraan dinas sebanyak 23 unit roda 4 dan 27 unit roda 2 terpelihara 2.KIR R4 3.pembayaran STNK Roda 4 dan Roda2	1 tahun 2 kali 1 tahun	241,198,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor Belanja 2.Pemeliharaan alat-alat kantor Pemeliharaan alat-alat kantor	1 tahun	109,585,000	1.Belanja Pemeliharaan Perlengkapan kantor Belanja 2.Pemeliharaan alat-alat kantor Pemeliharaan alat-alat kantor	1 tahun	109,585,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1. Pemeliharaan Gedung bangunan tempat kerja 2.Pemeliharaan lift gudang farmasi	1 tahun 4 kali	158,000,000	1. Pemeliharaan Gedung bangunan tempat kerja 2.Pemeliharaan lift gudang farmasi	1 tahun 4 kali	158,000,000
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>10,118,444,400</b>			<b>77,342,254,200</b>
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				<b>156,754,000</b>			<b>156,754,000</b>

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Jumlah sampel makanan yang diperiksa dan memenuhi syarat 2.Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang di bina 3.Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan terdistribusi ke 5 Kabupaten / Kota	60 persen 30 sarana 5 Kabupaten / Kota	156,754,000	1.Jumlah sampel makanan yang diperiksa dan memenuhi syarat 2.Jumlah sarana produksi dan distribusi makanan yang di bina 3.Obat, Vaksin dan perbekalan Kesehatan terdistribusi ke 5 Kabupaten / Kota	60 persen 30 sarana 5 Kabupaten / Kota	156,754,000
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>9,861,602,900</b>			<b>77,026,747,700</b>
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	01.Hibah Kelembagaaan PMI 02.Terlaksananya SPM Bencana 03.Obat dan perbekalan kesehatan 04.Vaksinasi massal 05.Pengelolaan vaksin covid-19 06.Pengelolaan data covid-19 07.Monev Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 08.Audit Kasus KIPi 09.Update Knowledge Petugas Surveilans	1 paket 100 persen 1 paket 10 Kegiatan 10 bulan 10 bulan 200 OH 4 3 Kegiatan 1 paket 1 paket	1,084,850,000	01.Hibah Kelembagaaan PMI 02.Terlaksananya SPM Bencana 03.Obat dan perbekalan kesehatan 04.Vaksinasi massal 05.Pengelolaan vaksin covid-19 06.Pengelolaan data covid-19 07.Monev Pelaksanaan Imunisasi Covid-19 08.Audit Kasus KIPi 09.Update Knowledge Petugas Surveilans 10.Alat PCR 11.Perengkapan PSC 119 12.Reagen pemeriksaan	1 paket 100 persen 1 paket 10 Kegiatan 10 bulan 10 bulan 200 OH 4 3 Kegiatan 1 paket 1 paket	70,141,040,200

		Puskesmas 10. Alat PCR 11. Perlengkapan PSC 119 12. Reagen pemeriksaan covid-19 13. media KIE covid 14. Sentra Vaksinasi 15. Tenaga Pendistribusi Obat 16. Tenaga mahasiswa kesehatan pendamping 17. Penambahan APD	193000 sampel 6 jenis 94 kali 4 OB 4 bulan 2 jenis		covid-19 13. media KIE covid 14. Sentra Vaksinasi 15. Tenaga Pendistribusi Obat 16. Tenaga mahasiswa kesehatan pendamping 17. Penambahan APD	193000 sampel 6 jenis 94 kali 4 OB 4 bulan 2 jenis	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 jam 2. Terlaksananya sentra vaksin	100 % 16 kegiatan	66,694,000	1. Persentase Penyelidikan Epidemiologi <24 jam 2. Terlaksananya sentra vaksin	100 % 16 kegiatan	46,694,000

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Anak < 1 tahun mendapat imunisasi lengkap 2. Anak baduta memperoleh imunisasi 3. lanjutan/booster persentase K4 persentase KN1	95 % 90 % 76 % 88 %	273,671,000	1. Anak < 1 tahun mendapat imunisasi lengkap 2. Anak baduta memperoleh imunisasi 3. lanjutan/booster persentase K4 persentase KN1	95 % 90 % 76 % 88 %	272,871,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Persentase puskesmas KPR	69%	450,000	Persentase puskesmas KPR	69%	450,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Persentase puskesmas santun lansia	90%	11,160,000	Persentase puskesmas santun lansia	90%	11,160,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	persentase balita kurus persentase bumil KEK	0.1 % 0.25 %	2,484,434,000	persentase balita kurus persentase bumil KEK	0.1 % 0.25 %	2,484,434,000

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	197 Pos 121 Puskesmas	2,800,000	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja puskesmas Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	197 Pos 121 Puskesmas	2,800,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	01.Desu/Keluraha n yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 02.Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 03.Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), 04.RS dilakukan IKL, Pasar dilakukan IKL 05.Pasar dilakukan IKL, 06.Hotel dilakukan IKL, 07.Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) 08.Jamban sehat unruk masyarakat miskin	100 % 2365 desa 96 Puskesmas 62 RS 120 Pasar 444 hotel 5 kab/kota 100 %	38,310,000	01.Desu/Keluraha n yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 02.Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) 03.Puskesmas dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), 04.RS dilakukan IKL, Pasar dilakukan IKL 05.Pasar dilakukan IKL, 06.Hotel dilakukan IKL, 07.Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) 08.Jamban sehat unruk masyarakat miskin	100 % 2365 desa 96 Puskesmas 62 RS 120 Pasar 444 hotel 5 kab/kota 100 %	38,310,000

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	01. Kampanye GERMAS 02. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan 03. Penerbitan majalah Mensana 04. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat 05. Media Promosi Cetak 06. Penilaian aksi konvergensi stunting	5 kab/kota 5 Kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 1 dokumen	1,593,041,000	01. Kampanye GERMAS 02. Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan 03. Penerbitan majalah Mensana 04. Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat 05. Media Promosi Cetak 06. Penilaian aksi konvergensi stunting	5 kab/kota 5 Kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 1 dokumen	801,828,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1. desa terlatih pengamatan jentik nyamuk 2. % DPS yang tersosialisasikan ISCT 3. fasilitas kesehatan yang melakukan strategi DOTS 4. % fasyankes yang mampu tata laksana kasuspneumonia 5. Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa 6. kab/kota yang melakukan deteksi dinikanker 7. Kab/kota yang melakukan Pengendalian kasus malaria 8. Kab/Kota yang melakukan posbindu standar dan PANDU PTM 9. klinik yang melaksanakan	40 desa 80 % 100 % 92.38 % 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 % 80 % 32 kegiatan	3,163,069,500	1. desa terlatih pengamatan jentik nyamuk 2. % DPS yang tersosialisasikan ISCT 3. fasilitas kesehatan yang melakukan strategi DOTS 4. % fasyankes yang mampu tata laksana kasuspneumonia 5. Kab/kota yang melaksanakan skrining jiwa 6. kab/kota yang melakukan deteksi dinikanker 7. Kab/kota yang melakukan Pengendalian kasus malaria 8. Kab/Kota yang melakukan posbindu standar dan PANDU PTM 9. klinik yang melaksanakan strategi DOTS 10. Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 11. Terlaksananya sentra vaksin	40 desa 80 % 100 % 92.38 % 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 % 80 % 32 kegiatan	2,602,208,500

		strategi DOTS 10.Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19 11.Terlaksananya sentra vaksin					
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan Standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	13 RS/ FKTL	5,320,000	FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan Standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	13 RS/ FKTL	2,215,000
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Terlaksananya sentra vaksin	100 % 16 kegiatan	447,710,400	Kab/Kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Terlaksananya sentra vaksin	100 % 16 kegiatan	190,071,000
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1. Klinik pertama mendapatkan pembinaan pelayanan 2.Laboratorium Kesehatan mendapatkan pembinaan Pelayanan kesehatan 3.Puskesmas dan Rumah Sakit yang Mendapatkan pembinaan pelayanan	30 klinik 3 laboratori um 40 Fasyanke s 121 puskesma s	323,823,000	1. Klinik pertama mendapatkan pembinaan pelayanan 2.Laboratorium Kesehatan mendapatkan pembinaan Pelayanan kesehatan 3.Puskesmas dan Rumah Sakit yang Mendapatkan pembinaan pelayanan kefarmasian 4.Puskesmas mendapatkan	30 klinik 3 laboratori um 40 Fasyanke s 121 puskesma s	127,296,000



# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

		kefarmasian 4. Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan	80 Rumah Sakit		pembinaan pelayanan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan	80 Rumah Sakit	
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Aplikasi Avaya Call Center PSC 119 DIY Kelengkapan PSC 119 DIY Pengembangan pelayanan sistem informasi / Faskes yang terintegrasi dengan sistem	1 paket 1 paket 1 paket	366,270,000	Aplikasi Avaya Call Center PSC 119 DIY Kelengkapan PSC 119 DIY Pengembangan pelayanan sistem informasi / Faskes yang terintegrasi dengan sistem	1 paket 1 paket 1 paket	305,370,000
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>				<b>4,920,000</b>			<b>79,920,000</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. Buku Data Kesehatan Tahun 2020 2. Buku Profil Kesehatan Tahun 2020 3. Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	1 dokumen 1 dokumen 180 materi	4,500,000	1. Buku Data Kesehatan Tahun 2020 2. Buku Profil Kesehatan Tahun 2020 3. Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	1 dokumen 1 dokumen 180 materi	4,500,000
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1. Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan 2. Pengadaan Monitor pemantauan Covid	6 sistem informasi 1 unit	420,000	1. Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan 2. Pengadaan Monitor pemantauan Covid	6 sistem informasi 1 unit	75,420,000
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan</b>				<b>95,167,500</b>			<b>78,832,500</b>

Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi							
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Klinik pratama yang mendapatkan 2.pembinaan mutu Laboratorium Yang mendapatkan Pembinaan Mutu 3.Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu 4.RS yang mendapatkan pembinaan mutu	1.3 Klinik 2.5 Laboratorium 3. 121 puskesmas 4.78 Rumah Sakit	95,167,500	1.Klinik pratama yang mendapatkan 2.pembinaan mutu Laboratorium Yang mendapatkan Pembinaan Mutu 3.Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu 4.RS yang mendapatkan pembinaan mutu	1.3 Klinik 2.5 Laboratorium 3. 121 puskesmas 4.78 Rumah Sakit	78,832,500
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				<b>253,701,000</b>			<b>1,902,109,000</b>
<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>				<b>0</b>			<b>1,662,500,000</b>
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.Insentif tenaga Kesehatan ATLM 2.Insentif tenaga Kesehatan Bidan 3. Insentif tenagaKesehatan Perawat	25 orang 2 orang 23 orang 1 orang 3 orang	0	1.Insentif tenaga Kesehatan ATLM 2.Insentif tenaga Kesehatan Bidan 3. Insentif tenagaKesehatan Perawat 4. Insentif tenaga Kesehatan Radiografer	25 orang 2 orang 23 orang 1 orang 3 orang	1,662,500,000

		4. Insentif tenaga Kesehatan Radiografer 5. Insentif tenaga Kesehatan Rekam Medis			5. Insentif tenaga Kesehatan Rekam Medis		
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>253,701,000</b>			<b>239,609,000</b>
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1. FKTL mendapatkan pembinaan Pemenuhan standar tenaga dan sarana perizinan 2. FKTP yang mendapatkan Pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana 3. Pedoman Instrumen Perizinan RS 4. Pembinaan Organisasi Profesi 5. Pembinaan Perizinan tenaga dan sarana kesehatan 6. Pembinaan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia 7. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perizinan	20 RS 20 laboratorium klinik 1 dokumen 20 Organisasi Profesi 5 kabupaten/kota 18 wahana 100 %	253,701,000	1. FKTL mendapatkan pembinaan Pemenuhan standar tenaga dan sarana perizinan 2. FKTP yang mendapatkan Pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana 3. Pedoman Instrumen Perizinan RS 4. Pembinaan Organisasi Profesi 5. Pembinaan Perizinan tenaga dan sarana kesehatan 6. Pembinaan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia 7. Sarana Kesehatan mendapat visitasi untuk rekomendasi perizinan	20 RS 20 laboratorium klinik 1 dokumen 20 Organisasi Profesi 5 kabupaten/kota 18 wahana 100 %	239,609,000
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN</b>				<b>9,647,000</b>			<b>3,752,000</b>

<b>MAKANAN MINUMAN</b>							
<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>				<b>9,647,000</b>			<b>3,752,000</b>
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan	30 sarana	9,647,000	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan	30 sarana	3,752,000
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>500,000,000</b>			<b>1,035,261,800</b>
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>				<b>500,000,000</b>			<b>1,035,261,800</b>

Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				500,000,000			1,035,261,800
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	1.Film Kestrad Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2.Lomba Film, Vlok dan Liputan Kestrad 3.Pemenuhan Kebutuhan/materi al Umum RSPAU Hardjolukito 4.Pengembangan Yankestrad Di Tempat Pariwisata 5.Penyehat Tradisional mendapatkan Pembinaan legalitas Pelayanan Penyehat Tradisional Terlatih 6.Jamu Herbal Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi Perawat 7.RS dan Puskesmas terlatih Akupresur Terkoordinasi ( Asosiasi Hatra,SP3T, Sainifikasi Jamu , 8.Penggalangan komitmen hatra dan Layanan Kesehatan Tradisional 9.Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional dan Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional Workshop	0 dok 1 dok 0 dok 26 jenis 1 dok 1 dok 0 orang 0 orang 15 orang 0 dok 0 dok 30 org	500,000,000	1.Film Kestrad Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2.Lomba Film, Vlok dan Liputan Kestrad 3.Pemenuhan Kebutuhan/materi al Umum RSPAU Hardjolukito 4.Pengembangan Yankestrad Di Tempat Pariwisata 5.Penyehat Tradisional mendapatkan Pembinaan legalitas Pelayanan Penyehat Tradisional Terlatih 6.Jamu Herbal Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi Perawat 7.RS dan Puskesmas terlatih Akupresur Terkoordinasi ( Asosiasi Hatra,SP3T, Sainifikasi Jamu , 8.Penggalangan komitmen hatra dan Layanan Kesehatan Tradisional 9.Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional dan Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional Workshop	0 dok 1 dok 0 dok 26 jenis 1 dok 1 dok 0 orang 0 orang 15 orang 0 dok 0 dok 30 org	1,035,261,800

Balai Laboratorium dan Kalibrasi

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,701,180,837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	3,490,536,264.00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Kota Yogyakarta	Akreditasi Laboratorium Alat Laboratorium Operasional Perkantoran Optimal 100% Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Uji Profisiensi Laboratorium	2 Kegiatan 4 Unit 12 Bulan  2 Kegiatan 1 Paket 7 Jenis  6 Sertifikat	4,949,226,700	Akreditasi Laboratorium Alat Laboratorium Operasional Perkantoran Optimal 100% Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Uji Profisiensi Laboratorium	2 Kegiatan 4 Unit 12 Bulan  2 Kegiatan 1 Paket 7 Jenis  6 Sertifikat	9,267,935,498.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Kota Yogyakarta	ETS Laboratorium COVID Penyediaan Alat-Alat Laboratorium	1 Paket 18 Macam	0	ETS Laboratorium COVID Penyediaan Alat-Alat Laboratorium	1 Paket 18 Macam	3,839,155,000.00

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Kota Yogyakarta	Operasional Perkantoran Optimal 100% Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyediaan Alat-Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia	12 Bulan 1 Paket 2 Macam 26 Macam 1 Paket	9,763,296,309	Operasional Perkantoran Optimal 100% Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyediaan Alat-Alat Laboratorium Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia	12 Bulan 1 Paket 2 Macam 26 Macam 1 Paket	6,439,661,309.00
---	-----------------	--	---	---------------	--	---	------------------

## Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1,977,898,805	Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1,871,043,655
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DIY	-Cakupan Jamkes Penyangga -Cakupan Jamkes Preventif -Cakupan Jamkes Rehabilitatif	100 Persen 10 Persen 20 Persen	37,036,205,500	-Cakupan Jamkes Penyangga -Cakupan Jamkes Preventif -Cakupan Jamkes Rehabilitatif	100 Persen 10 Persen 20 Persen	76,346,357,250

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIY	-Jumlah pegawai mendapatkan pelatihan verifikator sesuai kaidah aturan verifikasi -Jumlah pegawai mendapat pelatihan pelayanan prima (service excellent) -Tersedianya peralatan dan mesin lainnya guna menunjang pelayanan verifikasi kepesertaan, verifikasi klaim dan pelayanan pembayaran klaim	20 orang 35 orang 10 jenis	0	-Jumlah pegawai mendapatkan pelatihan verifikator sesuai kaidah aturan verifikasi -Jumlah pegawai mendapat pelatihan pelayanan prima (service excellent) -Tersedianya peralatan dan mesin lainnya guna menunjang pelayanan verifikasi kepesertaan, verifikasi klaim dan pelayanan pembayaran klaim	20 orang 35 orang 10 jenis	2,108,285,943
--	-----	--	----------------------------------	---	--	----------------------------------	---------------

Balai Pelatihan Kesehatan

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BALAI PELATIHAN KESEHATAN)	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomarani	Terselenggaranya Penyediaan Gaji ASN dan Naban	1 Tahun	2,706,995,227	Terselenggaranya Penyediaan Gaji ASN dan Naban	1 Tahun	2,476,057,889
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BALAI PELATIHAN KESEHATAN)	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomarani	1. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD 2. Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	16 Kegiatan 12 Bulan	1,974,182,000	1. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD 2. Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	16 Kegiatan 12 Bulan	4,812,921,492



# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (BALAI PELATIHAN KESEHATAN)	Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomarani	1. Audit Mutu Internal Bapelkes 2. Desa Laboratorium Lapangan yang Dibina 3. Evaluasi Pasca Pelatihan yang Dilakukan 4. Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes 5. Kurikulum Pelatihan yang Dibuat 6. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan 7. Promosi Pelatihan yang Dilakukan	1 Laporan 3 Desa 5 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Instansi	2,172,818,684	1. Audit Mutu Internal Bapelkes 2. Desa Laboratorium Lapangan yang Dibina 3. Evaluasi Pasca Pelatihan yang Dilakukan 4. Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes 5. Kurikulum Pelatihan yang Dibuat 6. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan 7. Promosi Pelatihan yang Dilakukan	1 Laporan 3 Desa 5 Laporan 12 Bulan 1 Kurikulum 1 Kegiatan 1 Instansi	1,839,238,184
--	-----------------------------------	---	---	---------------	---	---	---------------

## RS Jiwa Grhasia

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>							<b>52,804,713,312</b>
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN</b>							<b>52,804,713,312</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>							<b>47,477,961,772</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				20,882,653,406			<b>20,038,448,528</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RS Jiwa Grhasia	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	20,882,653,406	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	20,038,448,528
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				20,481,495,000			<b>27,439,513,244</b>

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RS Jiwa Grhasia	1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	20,481,495,000	1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	1. 4.400 kunjungan 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	27,439,513,244
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>5,326,751,540</b>			<b>5,326,751,540</b>
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>2,439,383,800</b>			<b>2,439,383,800</b>
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	RS Jiwa Grhasia	Pembangunan Gedung CSSD	1 paket	0	Pembangunan Gedung CSSD	1 paket	1,479,383,800
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	RS Jiwa Grhasia	-	-	960,000,000	-	-	-
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	RS Jiwa Grhasia	Pengadaan Ambulance Psikiatri	1 unit	0	Pengadaan Ambulance Psikiatri	1 unit	960,000,000
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>4,366,751,540</b>			<b>2,887,367,740</b>
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RS Jiwa Grhasia	1. Pengadaan Upgrade SIM RS 2. Pengadaan Alat Kesehatan HCU 3. Pemenuhan Instalasi CSSD dan Peralatan Sterilisasi	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket	4,366,751,540	1. Pengadaan Upgrade SIM RS 2. Pengadaan Alat Kesehatan HCU 3. Pemenuhan Instalasi CSSD dan Peralatan Sterilisasi	1. 1 Paket 2. 1 Paket 3. 1 Paket	2,887,367,740

RS Paru Respira

Uraian	Lokasi	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan		
		Indikator	Target Capaian	Jumlah	Indikator	Target Capaian	Jumlah
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)		Gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	11,011,230,885	Gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	10,239,796,473.00
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>							
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)		1. Alat Kesehatan Lingkungan 2. Alat Non Kesehatan 3. General Check UP 4. Jasa Pelayanan Rumah Sakit 5. Kegiatan Peningkatan Mutu 6. Kredensial 7. Notebook, printer dan UPS 8. Pelayanan transfusi darah 9. Pemeriksaan laboratorium rujukan 10. Peningkatan Pelayanan Keperawatan 11. Penyediaan Administrasi Perkantoran 12. Penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 13. Penyediaan Tenaga Non PNS 14. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 15. Perijinan radiologi	2 jenis 8 jenis 3 jenis 6 kali 11 jenis 15 orang 3 jenis 12 bulan 12 bulan 4 jenis 7 jenis 4 jenis 20 OB 5 kegiatan 3 jenis 155 orang 4 jenis	10,400,000,000	1. Alat Kesehatan Lingkungan 2. Alat Non Kesehatan 3. General Check UP 4. Jasa Pelayanan Rumah Sakit 5. Kegiatan Peningkatan Mutu 6. Kredensial 7. Notebook, printer dan UPS 8. Pelayanan transfusi darah 9. Pemeriksaan laboratorium rujukan 10. Peningkatan Pelayanan Keperawatan 11. Penyediaan Administrasi	2 jenis 8 jenis 3 jenis 6 kali 11 jenis 15 orang 3 jenis 12 bulan 12 bulan 4 jenis 7 jenis 4 jenis 20 OB 5 kegiatan 3 jenis 155 orang 4 jenis	18,877,399,119.00

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

		16. Perjalanan dinas 17. Sarana Promosi Kesehatan 18. Sertifikat Akreditasi 19. SIMRS 20. Tersedianya alat kantor lainnya 21. Tersedianya alat kedokteran 22. Tersedianya Komputer PC dan Laptop 23. Tersedianya Oxgen concentrator 24. Tersedianya printer 25. Tersedianya smartphone tablet dan smartphone	1 dokumen 1 paket 4 jenis 5 jenis 8 unit 12 unit 7 unit 3 unit		Perkantoran 12. Penyediaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit 13. Penyediaan Tenaga Non PNS 14. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan 15. Perijinan radiologi 16. Perjalanan dinas 17. Sarana Promosi Kesehatan 18. Sertifikat Akreditasi 19. SIMRS 20. Tersedianya alat kantor lainnya 21. Tersedianya alat kedokteran 22. Tersedianya Komputer PC dan Laptop 23. Tersedianya Oxgen concentrator 24. Tersedianya printer 25. Tersedianya smartphone tablet dan smartphone	1 dokumen 1 paket 4 jenis 5 jenis 8 unit 12 unit 7 unit 3 unit	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>							

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
Pengembangan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)		1. Tersediaanya gedung Ruang Operasi 2. Tersedianya gedung rawat jalan	1 kegiatan 1 kegiatan	6,999,330,000	1. Tersediaanya gedung Ruang Operasi 2. Tersedianya gedung rawat jalan	1 kegiatan 1 kegiatan	5,247,330,000.00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)		1. Alat kesehatan 2. Hepa portable 3. Rehab Ruang Perawatan Isolasi COVID-19	11 jenis 8 unit 1 paket	0	1. Alat kesehatan 2. Hepa portable 3. Rehab Ruang Perawatan Isolasi COVID-19	11 jenis 8 unit 1 paket	3,385,000,000.00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)		01. Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang	15 orang 12 bulan 10 unit	9,515,300,000	01. Honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang	15 orang 12 bulan 10 unit	9,707,600,000.00
		02. Biaya tagihan listrik, telepon dan air	39640 OH		02. Biaya tagihan listrik, telepon dan air	39640 OH	
		03. Komputer	14 OB		03. Komputer	14 OB	
		04. Penyediaan Extrafooding	16 OB		04. Penyediaan Extrafooding	16 OB	
		05. Penyediaan Jasa Cleaning Service	1 paket		05. Penyediaan Jasa Cleaning Service	1 paket	
		06. Penyediaan Jasa Keamanan	2 paket		06. Penyediaan Jasa Keamanan	2 paket	
		07. BMHP, APD, reagen kewaspadaan COVID-19 dan TB MDR	3 paket 5 jenis 10 jenis		07. BMHP, APD, reagen kewaspadaan COVID-19 dan TB MDR	3 paket 5 jenis 10 jenis	
		08. BMHP dan reagen	1 paket		08. BMHP dan reagen	1 paket	
		09. Obat	1 paket		09. Obat	1 paket	
		10. Alat Non Kesehatan			10. Alat Non Kesehatan		
		11. Alat Kesehatan			11. Alat Kesehatan		
		12. Penyusunan Studi Kelayakan Pengadaan Tanah			12. Penyusunan Studi Kelayakan Pengadaan Tanah		
		13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah			13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah		

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota, disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya Pergub DIY No 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus (BKK) dari usulan kabupaten/ kota diantaranya adalah BKK untuk penyediaan sarana jamban sehat (Jambanisasi) dan dukungan pemenuhan standar alat kesehatan RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.

**Tabel 2-15 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2010	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	172.570.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	108.000.000
2011	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	89.990.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	179.669.000
2012	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	270.815.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	389.342.200
2013	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	286.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	243.662.800

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2014	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	292.398.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	239.801.000
2015	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	400.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	400.000.000
2016	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	463.229.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	620.000.000
2017	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular	DIY	KPAD	564.818.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	443.156.000
2018	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Upaya Kesehatan Rujukan dan Khusus	DIY	PMI	420.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	1.036.000.000
2019	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000



Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	BKK Pembanguan RSUD Wates	70.000.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	2.000.000.000
2020	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan Lain	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Pelayanan Kesehatan lain	DIY	BKK Pembanguan RSUD Wates	40.810.000.000
	Program Kesehatan Masyarakat	Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat	DIY	BKK Jambanisasi	3.378.000.000
2021	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000

Tahun Alokasi	Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran (Rp)
2022	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	KPAD	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	PMI	500.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan	DIY	BKK Jambanisasi	1.525.000.000
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	<b>Keg:</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi <b>Sub keg:</b> Pemenuhan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	DIY	BKK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari	18.060.000.000

## BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan Pengembangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh program RPJMN 2020-2024 terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Sedangkan pembangunan di DIY 2020 selain mengacu pada program RPJMN 2020-2024, juga sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang tertuang dalam visi Gubernur DIY 2017-2022, yaitu menyongsong "abad samudra hindia" untuk kemuliaan martabat manusia Jogja" dan misi pancamulia, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatanketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat,serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritoriekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomiyang berkeadilan,
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakatmaupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dankebersamaan,
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasamalu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpanganpenyimpanganyang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agenda pembangunan di DIY tahun 2021 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan *trigger* penurunan angka kemiskinan di DIY. Upaya pencapaian tema pembangunan tahun 2021 dilaksanakan melalui skema tematik pembangunan yang didukung lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan lintas kabupaten/kota. Arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial disusun dengan berdasarkan pada sasaran pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2021, yaitu penurunan ketimpangan wilayah, penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pembangunan bandara NYIA, dan

pembiayaan pembangunan.

Mengacu pada 4 isu tematik tersebut, maka kegiatan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan DIY pun harus sejalan dengan 4 isu tematik tersebut disamping kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan Dinas Kesehatan DIY. Namun untuk pembangunan 2021, kegiatan Dinas Kesehatan hanya mendukung 3 kebijakan pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Isu pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, yaitu melalui pembangunan RSUD Wates dan pengembangan kesehatan tradisional.
2. Isu penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui upaya penjaminan kesehatan oleh Bapel Jamkesos dan Bantuan keuangan khusus untuk sanitasi, khususnya jamban.
3. Isu pembiayaan pembangunan, untuk 2020 dilakukan dengan penemuan penderita dan pendampingan pengobatan TB-HIV, pelayanan jamkesus disabilitas, dan melalui kepesertaan mandiri jamkesos.

Di samping ketiga isu tersebut, 2 hal yang tidak boleh terlepas dari agenda pembangunan kesehatan di DIY adalah kesiapan penanganan dalam kondisi KLB dan bencana, yang menjadi SPM kesehatan di provinsi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)		(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penurunan Jumlah kasus kematian ibu	37	36	35	34	34
		Penurunan Jumlah kasus kematian bayi	340	336	327	323	318
		Prevalensi balita kurang gizi (KEP)	15.8	15.7	15.6	15.7	15.4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya perilaku sadar sehat	Persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga	%	67,77 (82)	100 (121)	100 (121)	100 (121)	100 (121)
2.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi	%	64.89 170	67.18 176	69.08 181	70.99 186	73.28 192
3	Terwujudnya pelayanan kesehatan Jiwa yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan kesehatan jiwa	%	56	60	65	70	75
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan Paru yang bermutu	Persentase pemenuhan standar mutu pelayanan*	%	73.20	74.8	77.2	78.9	81.3

Catatan : \* Kesehatan Paru

### 3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2021. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		100%				n/a	n/a
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,931,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			31,929,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			2,281,000.00			n/a	n/a
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6,721,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			54,548,814,005.00			n/a	n/a
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			54,472,614,005.00			n/a	n/a
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			70,200,000.00			n/a	n/a



1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1,662,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4,338,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			16,400,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2,000,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			14,400,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			9,315,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			9,315,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			268,309,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,368,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			22,153,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			11,440,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12,980,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			11,740,000.00			n/a	n/a

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4,416,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			103,212,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			98,000,000.00			n/a	n/a
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38,774,000.00			n/a	n/a
1	2	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33,150,000.00			n/a	n/a
1	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5,624,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			1,516,375,665.00			n/a	n/a
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1,500,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			548,115,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			966,760,665.00			n/a	n/a
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			479,341,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			218,091,000.00			n/a	n/a

1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			111,250,000.00			n/a	n/a
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150,000,000.00			n/a	n/a
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		100%	56,003,874,500.00			n/a	n/a
1	02	02	1.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			63,698,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			63,698,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>			55,901,121,500			n/a	n/a
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			50,375,913,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			109,805,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			198,000,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			85,166,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut			22,567,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			211,461,000.00			n/a	n/a

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			29,610,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			29,935,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			536,506,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1,523,609,500.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			7,430,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2,106,866,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			315,953,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			348,300,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>			5,550,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			5,100,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			450,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			33,505,000.00			n/a	n/a
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			33,505,000.00			n/a	n/a
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		100%	73,130,000.00			n/a	n/a

1	02	03	1.02		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>			73,130,000.00			n/a	n/a
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			73,130,000.00			n/a	n/a
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>			1,958,000.00			n/a	n/a
1	02	04	1.02		<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>			1,958,000.00			n/a	n/a
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional			1,958,000.00			n/a	n/a
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		100%	626,313,000.00			n/a	n/a
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			626,313,000.00			n/a	n/a
2	22	08			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>			626,313,000.00			n/a	n/a
2	22	08	1.08		<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>			626,313,000.00			n/a	n/a
2	22	08	1.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional			626,313,000.00			n/a	n/a

## Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			43,594,074,993			
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		100 Persen	34,704,091,001			
1	02	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		100 Persen	3,911,695,524			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 Bulan	3,875,935,524	DAU	n/a	n/a
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 Bulan	35,760,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		100 Persen	15,000,000			
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 Bulan	15,000,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100 Persen	155,064,000			
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 Bulan	155,064,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100 Persen	24,342,837,591			
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	2 Unit 6 Unit 1 Unit	132,018,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	2 Buku	7,859,591	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	1 Unit	24,166,960,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	1 Unit 1 Paket	36,000,000	PAD	n/a	n/a

1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	1,136,441,886			
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12	Bulan	526,888,800	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 12 12	Bulan Bulan Bulan	609,553,086	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>Persen</b>	193,052,000			
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12	Bulan	193,052,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>5</b>	<b>Persen</b>	4,950,000,000			
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	12 12 2 7 2 3 2	Bulan Bulan Kegiatan Jenis Kegiatan Macam Paket	4,950,000,000		n/a	n/a
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>62.84</b>	<b>Persen</b>	8,889,983,992			
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Darah Provinsi</b>		<b>15</b>	<b>Layanan</b>	8,889,983,992			
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	DIY	2 32	Jenis Macam	8,889,983,992		n/a	n/a

## Balai Pelatihan Kesehatan

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DIY	100%	<b>7,319,995,936</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	100%	<b>2,607,603,868</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	1 Tahun	2,582,943,868	DAU	n/a	n/a
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	DIY	1 Tahun	24,660,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	DIY	100%	<b>10,320,000</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan ydag Berlaku	DIY	1 Tahun	10,320,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	100%	<b>157,504,500</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	23,679,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	12 Bulan	52,696,500	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DIY	12 Bulan	49,984,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	DIY	12 Bulan	2,756,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	12 Bulan	13,389,000	PAD	n/a	n/a



**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	DIY	12 Bulan	15,000,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Peralatan	DIY	100%	<b>82,210,000</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	1 Paket	82,210,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DIY	100%	<b>1,147,049,168</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DIY	12 Bulan	1,000,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	12 Bulan	298,540,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 2. Terbayarnya Jasa Keamanan Kantor 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	847,509,168	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DIY	100%	<b>315,308,400</b>		n/a	n/a
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor 2. Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor	DIY	10 Unit 12 Bulan	90,038,400	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	DIY	12 Bulan	3,100,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	DIY	12 Bulan	51,370,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	125,500,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	45,300,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	DIY	86%	<b>3,000,000,000</b>		n/a	n/a

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD 2. Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIY	32 Kegiatan 12 Bulan	3,000,000,000	BLUD	n/a	n/a
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	DIY	68%	<b>165,288,500</b>		n/a	n/a
1	02	03	1.02		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	DIY	86%	<b>165,288,500</b>		n/a	n/a
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Audit Mutu Internal Bapelkes 2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) yang Dilakukan 3. Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat 4. Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat 5. Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes 6. Kurikulum Pelatihan yang Dibuat 7. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan 8. Pengembangan Sistem Pembelajaran	DIY	1. 2 Laporan 2. 6 Laporan 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan 5. 12 Bulan 6. 1 Kurikulum 7. 1 Kegiatan 8. 1 Sistem	165,288,500	PAD, DID	n/a	n/a

## Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			100%				
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			100%				
	1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DIY	100 Persen, 12 Persen, 25 Persen	69,518,620,960	PR, DID, APBD	n/a	n/a
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%				
1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%				
	1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	1 tahun	1,954,491,878	APBD	n/a	n/a
	1.02.01.1.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DIY	1 tahun	31,860,000	APBD	n/a	n/a
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%				
1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%				
	1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DIY	1 tahun	9,060,000	APBD	n/a	n/a
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100%				
1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%				
	1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	6 jenis	6,967,000	APBD	n/a	n/a
	1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	51 jenis	134,509,000	APBD	n/a	n/a
	1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DIY	9 jenis	25,790,000	APBD	n/a	n/a

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

				1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DIY	6 jenis dan 40 orang	84,216,000	APBD	n/a	n/a
				1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DIY	1 tahun	40,492,000	APBD	n/a	n/a
				1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DIY	1 tahun	2,580,000	APBD	n/a	n/a
				1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DIY	1 tahun	259,882,000	APBD	n/a	n/a
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,</b>						<b>100%</b>				
<b>1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>100%</b>				
				1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	DIY	1 tahun	30,000,000	APBD	n/a	n/a
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,</b>						<b>100%</b>				
<b>1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>100%</b>				
				1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	1 tahun	99,650,400	APBD	n/a	n/a
				1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	@12 bulan	381,606,444	APBD	n/a	n/a
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI,</b>						<b>100%</b>				
<b>1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>100%</b>				
				1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DIY	3 unit	57,549,000	APBD	n/a	n/a
				1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DIY	a. 1 unit b. 3 unit	30,000,000	APBD	n/a	n/a
				1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DIY	1 tahun	4,000,000	APBD	n/a	n/a

RS Paru Respira

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			32,810,002,591			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			22,396,294,591			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10,568,262,591			
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	1 tahun	10,510,302,591	DAU	n/a	n/a
1	02	01	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	1 tahun	57,960,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			19,800,000			
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	1 tahun	19,800,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,408,232,000			
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	17 jenis	159,476,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	2 jenis buah 2 jenis unit 8 jenis unit 7 jenis unit 14 jenis unit	329,114,000	PAD	n/a	n/a

**RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022**

1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	30 1 1	unit paket paket	919,642,000	PAD	n/a	n/a
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.10</b>		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				<b>10,400,000,000</b>			
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	7 1 6 11 3 1 5 12 12 4 5 6 20	jenis dokumen kali kegiatan kegiatan tahun jenis bulan bulan jenis kegiatan jenis orang	10,400,000,000	Pendap atan dari BLUD	n/a	n/a
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>10,413,708,000</b>			
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.01</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>8,848,130,000</b>			
1	02	01	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	1	Paket	2,659,700,000	PAD	n/a	n/a
1	02	01	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	18	jenis	636,100,000	DID	n/a	n/a
1	02	01	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	2	paket	5,552,330,000	PAD, DID	n/a	n/a
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>1.02</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>				<b>1,565,578,000</b>			
1	02	01	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Bantul	3 2	Jenis paket	1,565,578,000	DID	n/a	n/a

RS Jiwa Grhasia

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI							
1	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN / Naban	RS Jiwa Grhasia	1 Tahun	20,476,543,357	Dana Alokasi Umum (DAU)	n/a	n/a
1	02	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD							
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	RS Jiwa Grhasia	1. 4.400 orang 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	20,500,000,000	Pendapatan BLUD	n/a	n/a
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							
1	02	02	1	01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum	RS Jiwa Grhasia	1 Paket	4,012,168,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	n/a	n/a
1	02	02	1	01		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi							

# RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2022

1	02	02	1	01	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing & visum et repertum 2. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 3. Pengadaan dokumen AMDAL lingkungan 4. Pengadaan hardware SIMRS	RS Jiwa Grhasia	1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket	1,803,101,450	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Insentif Daerah (DID)	n/a	n/a
---	----	----	---	----	----	-----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	-----	-----



## BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan 2022

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Pagu : Rp.

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lok asi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sum ber Dana
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				113,004,069,170	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	DIY	100 %	56,918,259,670	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinkes DIY	DIY	100 %	40,931,000.00	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. Renstra 2. Renja 2023 3. ROPK 2022 4. perubahan renja 2022	DIY	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	31,929,000.00	APBD
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-DPA perubahan -Tersusunnya dokumen perencanaan sesuai dengan kaidah yang berlaku: 1. DPA	DIY	1 dokumen 1 dokumen	2,281,000.00	APBD
1	2	1	1.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan 02. Rekomendasi pelaksanaan kegiatan SKPD	DIY	1 dokumen 1 dokumen	6,721,000.00	APBD
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya administrasi Keuangan Dinkes DIY	DIY	100 %	54,548,814,005.00	

1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	1 tahun	54,472,614,005.00	DAU
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	DIY	12 bulan	70,200,000.00	APBD
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Tahunan SKPD	DIY	1 dokumen	1,662,000.00	APBD
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/Fungsional Laporan Semester/Prognosis	DIY	24 dokume 1 dokumen	4,338,000.00	APBD
1	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	tercapainya pengamanan barang milik daerah	DIY	100 %	16,400,000.00	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembayaran PBB Dinkes DIY	DIY	1 Tahun	2,000,000.00	APBD
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		DIY		14,400,000.00	APBD
1	02	01	1.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DIY	100 %	9,315,000.00	
1	02	01	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengisian tabung pemadam kebakaran dan BBM cold room	DIY	1 paket	9,315,000.00	APBD
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	tercapainya Administrasi Umum perkantoran Dinkes DIY	DIY	100 %	268,309,000.00	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembelian alat listrik dinkes diy	DIY	1 paket	4,368,000.00	APBD
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian ATK Pembelian laptop Pembelian PC	DIY	17 Jenis 2 Unit 2 Unit	22,153,000.00	APBD
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian alat kebersihan	DIY	1 paket	11,440,000.00	APBD
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Logistik coldroom Pengisian tabung pemadam kebakaran	DIY	270 liter 1 paket	12,980,000.00	APBD
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan	DIY	1 paket	11,740,000.00	APBD
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan surat kabar	DIY	12 bulan	4,416,000.00	APBD
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan makan minum rapat dan perjalanan dinas	DIY	1 Tahun	103,212,000.00	APBD

1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	pengembangan aplikasi/ website	DIY	1 paket	98,000,000.00	APBD
1	2	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang milik Daerah	DIY	100%	38,774,000.00	APBD
1	2	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembelian Komputer Pembelian Laptop	DIY	1 unit 2 unit	33,150,000.00	APBD
1	2	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembelian Tangga	DIY	2 unit	5,624,000.00	APBD
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY	DIY	100 %	1,516,375,665.00	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat terproses dengan baik	DIY	1 paket	1,500,000.00	APBD
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan air, listrik, telepon , fax dan zoom	DIY	1 tahun	548,115,000.00	APBD
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor pengelola keuangan dan pengurus barang, honor tenaga non PNS, cleaning servis dan satpam	DIY	12 bulan	966,760,665.00	APBD
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY	DIY	100 %	479,341,000.00	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kir Pick up Pembayaran STNK 27 roda 2 dan 23 roda 4 Terpelihara kendaraan dinas 27 roda 2 dan 23 roda 4	DIY	2 kali 1 tahun 1 paket	218,091,000.00	APBD
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara perlengkapan dan peralatan kantor	DIY	1 Tahun	111,250,000.00	APBD
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara gedung kantor Terpelihara lift	DIY	1 Tahun 4 kali	150,000,000.00	APBD
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	62,84 %	56,003,874,500.00	
1	02	02	1.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Jumlah alat kesehatan, obat, vaksin yang didistribusikan dan sarana distribusi makanan minuman yang di	DIY	5 kab/kota	63,698,000.00	

						bina sesuai kebutuhan				
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sarana Produksi dan Distribusi Makanan yang di bina sesuai standar	DIY	30 sarana	63,698,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	tercapainya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	DIY	100 %	55,901,121,500	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-BKK pengadaan Alat Kesehatan RSUD Saptosari -hibah PMI -Obat Bufferstock dan Perbekes Tersedia -penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan penyediaan peralatan Covid-19 -reagen pemeriksaan Covid-19	DIY	1 paket 1 tahun 1 paket 100 % 9 macam 1 paket	50,375,913,000.00	DID, APBD , DAU
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penyelidikan Epidemiologi <24 jam	DIY	100 %	109,805,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-Anak <1th mendapat imunisasi lengkap -Anak baduta mendapat imunisasi lanjutan/booster -Persentase K4 -Persentase KN1	DIY	95 % 90 % 77 % 89 %	198,000,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Persentase Puskesmas PKPR	DIY	73 %	85,166,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Persentase Puskesmas Santun Lansia	DIY	94 %	22,567,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-Persentase Penurunan Balita Kurus -Persentase Penurunan Ibu Hamil KEK	DIY	0.4 % 1 %	211,461,000.00	DID, APBD

1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja -Puskesmas Melaksanakan Kesehatan olahraga	DIY	197 pos uk 121 puskes	29,610,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-BKK jambanisasi -Desa/Kelurahan yang dilakukan verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -Kab/Kota dilakukan pembinaan Kab/Kota Sehat (KKS) -Sekolah (SD, SMP, SLTA) yang dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	DIY	4 kab 180 desa/k 5 kab / kota 2365 sekol	29,935,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-Kajian pemanfaatan media dan pembuatan media promosi kesehatan -Kampanye GERMAS -Media Promosi Film/Iklan Layanan Masyarakat -Penerbitan majalah Mensana	DIY	5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota 5 kab / kota	536,506,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-DPS yang tersosialisasikan - ISTC (International Standart For Tuberculosis Care) -hibah KPAD -Kab/Kota yang melaksanakan PANDU PTM -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program Hepatitis -Kab/Kota yang melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan Program PISP/Diare -Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian kasus malaria -Kab/Kota yang melaksanakan posbindu sesuai standar -Kab/Kota yang melaksanakan skrining jiwa -Kab/Kota yang melakukan	DIY	125 DPS 1 tahun 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 100 klinik	1,523,609,500.00	DID, APBD

						gerakan 1 rumah 1 jumentik -Kab/kota yang melakukan “pemahaman stigma dan diskriminasi” HIV AIDS -Klinik yang melaksanakan strategi DOTS				
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana dan jaminan kesehatan	DIY	10 RS/ FKTL	7,430,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 95% Sasaran yang mendapat Imunisasi Covid-19	DIY	100 % 80 %	2,106,866,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-Fasyankes yang dibina dalam memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar -Klinik mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan -Puskesmas mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan dasar -RS mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan	DIY	45 fasyank 40 klinik 121 puskes 80 rs	315,953,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pengembangan pelayanan SPGDT	DIY	100 %	348,300,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan	DIY	100 %	5,550,000.00	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	-Buku Data Kesehatan Tahun 2021 -Buku Profil Kesehatan Tahun 2021 -Jumlah materi tentang informasi kesehatan yang lengkap	DIY	1 dokumen 1 dokumen 180 materi	5,100,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pengelolaan sistem informasi kesehatan	DIY	6 sistem infomasi	450,000.00	DID, APBD
1	02	02	1.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat</b>	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Mendapatkan	DIY	100 %	33,505,000.00	

					Daerah Provinsi	Pembinaan Mutu				
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-Klinik Pratama yang mendapatkan pembinaan mutu -laboratorium yang mendapatkan pembinaan mutu -Puskesmas yang mendapatkan pembinaan mutu -Rumah Sakit Yang mendapatkan pembinaan mutu	DIY	30 Klinik Pratama 5 laborator 121 Puskesmas 80 Rumah Sakit	33,505,000.00	DID, APBD
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular	DIY	62,84 %	73,130,000.00	
1	02	03	1.02		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		DIY		73,130,000.00	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	FKTP dan FKTL yang mendapatkan pembinaan pemenuhan standar tenaga dan sarana	DIY	12 bulan	73,130,000.00	DID, APBD
1	02	04			<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar	DIY	86.48 %	1,958,000.00	
1	02	04	1.02		<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	Sarana produksi dan distribusi obat tradisional yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar	DIY	35 sarana	1,958,000.00	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional yang mendapatkan pembinaan	DIY	35 Sarana	1,958,000.00	DID, APBD
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		DIY	100%	626,313,000.00	
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>		DIY		626,313,000.00	
2	22	08			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	Persentase peningkatan Budaya tak benda yang dilestarikan	DIY	20 %	626,313,000.00	
2	22	08	1.08		<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi</b>	Terselenggaranya	DIY	100 %		

					<b>Budaya</b>	pengembangan pelayanan kesehatan tradisional			626,313,000.00	
2	22	08	1.08	04	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Kajian Pengembangan Kesehatan Tradisional 2. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Jamu Herbal 3. Pelatihan Penyehat Tradisional Terlatih Pijat Refleksi 4. Penyehat Tradisional mendapatkan pembinaan legalitas pelayanan 5. Workshop Sainifikasi Jamu 6. Terkoordinasinya (Asosiasi Hatra, SP3T, Sainifikasi Jamu dan layanan Kestrad) 7. Pengembangan Yankestraddi Dinkes DIY 8.a. Tersosialisasinya Kebijakan Kesehatan Tradisional 8.b. Konsultasi Teknis Kesehatan Tradisional 8.c. Pameran JamuHerbal dan Kestrad DIY 8.d. lomba Film, Vlok, dan liputan Kestrad 8. Promosi Kesehatan Tradisional	DIY	2 dokumen 40 orang 40 orang 30 orang 30 orang 1 Dokumen 2 Dokumen 1 event 1 event 1 event 3 event 0 event	626,313,000.00	DAIS



## Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)					
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lok asi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					43,594,074,993	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	Persen	34,704,091,001	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan		100	Persen	3,911,695,524	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK	DIY	12	Bulan	3,875,935,524	DAU
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	DIY	12	Bulan	35,760,000	PAD
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah		100	Persen	15,000,000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Pembayaran Honorarium Pengurus Barang Pembantu	DIY	12	Bulan	15,000,000	PAD
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Pada Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi		100	Persen	155,064,000	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Umum (Extrafooding)	DIY	12	Bulan	155,064,000	PAD
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Barang Milik Daerah		100	Persen	24,342,837,591	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	UPS Komputer Monitor	DIY	2 6 1	Unit Unit Unit	132,018,000	PAD

1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Buku SNI	DIY	2	Buku	7,859,591	PAD
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Terbangunnya Gedung Laboratorium	DIY	1	Unit	24,166,960,000	PAD
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	AC Instalasi Penangkal Petir	DIY	1 1	Unit Paket	36,000,000	PAD
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi</b>		100	Persen	1,136,441,886	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Belanja Telepon, Air, Listrik dan Fax	DIY	12	Bulan	526,888,800	PAD
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Pembayaran Jasa Keamanan Kantor Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran Jasa Pencucian Alat-Alat Laboratorium	DIY	12 12 12	Bulan Bulan Bulan	609,553,086	PAD
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		100	Persen	193,052,000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Pemeliharaan Gedung Bangunan Tempat Kerja	DIY	12	Bulan	193,052,000	PAD
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Pengembangan Pelayanan Laboratorium</b>		5	Persen	4,950,000,000	

1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Untuk Mendukung Operasional Perkantoran Berjalan Optimal 100% Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Akreditasi Laboratorium Promosi Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan Sstem Informasi Manajemen (SIM)	DIY	12	Bulan	4,950,000,000	
								12	Bulan		
								2	Kegiata n Jenis		
								7			
								2			
								3	Kegiata n		
								2	`Maca m		
									Paket		
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular		62.8 4	<b>Persen</b>	8,889,983,992	
1	02	02	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Darah Provinsi</b>	Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium Untuk Mendukung Program, Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat		15	<b>Layana n</b>	8,889,983,992	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI)	Penyediaan Bahan Kimia/Reagensia dan Bahan Penunjang Lainnya Penyediaan Alat-Alat Laboratorium	DIY	2 32	Jenis Macam	8,889,983,992	

Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Sosial

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana

<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT , 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>						<b>69,518,620,960</b>	
				1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jamkes Penyangga, Cakupan Jamkes Preventif, Cakupan Jamkes Rehabilitatif	100 Persen, 12 Persen, 25 Persen	PR, DID, APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>1,986,351,878</b>	
				1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	APBD
				1.02.01.1.02.03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	1 tahun	APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>9,060,000</b>	
				1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 tahun	APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>554,436,000</b>	
				1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6 jenis	APBD
				1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	51 jenis	APBD
				1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	9 jenis	APBD
				1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor: a. APAR b. Ekstrafooding	6 jenis dan 40 orang	APBD
				1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedia barang cetak dan penggandaan	1 tahun	APBD
				1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan surat dan Majalah 2 jenis	1 tahun	APBD
				1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi b. Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 tahun	APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>30,000,000</b>	
				1.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya sistem aplikasi pelayanan Jaminan Kesehatan	1 tahun	APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>481,256,844</b>	
				1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 tahun	APBD

					1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	a. Keamanan kantor terjaga dengan baik, b. Kebersihan kantor terjaga dengan baik, c. Arsip kantor terkelola dengan baik d. Penyediaan Restribusi sampah e. Penyediaan Pengolahan air limbah	@12 bulan	381,606,444	APBD
<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>91,549,000</b>	
					1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda dua yang tepat waktu, 2. Bukti Pembayaran Pajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda empat yang tepat waktu 3. Kendaraan dinas/operasional roda dua terpelihara sesuai RKPMD 4. Kendaraan dinas/operasional roda empat terpelihara sesuai RKPMD	3 unit	57,549,000	APBD
					1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya : a. BCB b. Non BCB	a. 1 unit b. 3 unit	30,000,000	APBD
					1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya jaringan instalasi listrik	1 tahun	4,000,000	APBD

**Balai Pelatihan Kesehatan**

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	DIY	100%	<b>7,319,995,936</b>	
1	02	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DIY	100%	<b>2,607,603,868</b>	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN	DIY	1 Tahun	2,582,943,868	DAU
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	DIY	1 Tahun	24,660,000	PAD

1	02	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	DIY	100%	<b>10,320,000</b>	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan BMD Sesuai Ketentuan yang Berlaku	DIY	1 Tahun	10,320,000	PAD
1	02	01	1.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	DIY	100%	<b>157,504,500</b>	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	23,679,000	PAD
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DIY	12 Bulan	52,696,500	PAD
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	DIY	12 Bulan	49,984,000	PAD
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	DIY	12 Bulan	2,756,000	PAD
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DIY	12 Bulan	13,389,000	PAD
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	DIY	12 Bulan	15,000,000	PAD
1	02	01	1.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Terlaksananya Pengadaan Peralatan	DIY	100%	<b>82,210,000</b>	
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	DIY	1 Paket	82,210,000	PAD
1	02	01	1.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DIY	100%	<b>1,147,049,168</b>	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	DIY	12 Bulan	1,000,000	PAD
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DIY	12 Bulan	298,540,000	PAD
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan Kantor 2. Terbayarnya Jasa Keamanan Kantor 3. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	DIY	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	847,509,168	PAD
1	02	01	1.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	DIY	100%	<b>315,308,400</b>	

1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Terbayarnya Pajak Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor 2. Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional Kantor	DIY	10 Unit 12 Bulan	90,038,400	PAD
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	DIY	12 Bulan	3,100,000	PAD
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	DIY	12 Bulan	51,370,000	PAD
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	125,500,000	PAD
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana Prasarana dan Bangunan Kantor	DIY	12 Bulan	45,300,000	PAD
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	DIY	86%	<b>3,000,000,000</b>	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan dari Jasa Layanan BLUD 2. Pelayanan Pendukung dan Penunjang Pelayanan BLUD	DIY	32 Kegiatan 12 Bulan	3,000,000,000	BLUD
1	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase Mantan Linatih yang Meningkatkan Kompetensinya	DIY	68%	<b>165,288,500</b>	
1	02	03	1.02		<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan	DIY	86%	<b>165,288,500</b>	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Audit Mutu Internal Bapelkes 2. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) yang Dilakukan 3. Grand Design Laboratorium Kelas yang Dibuat 4. Grand Design Laboratorium Lapangan yang Dibuat 5. Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran yang Mendukung Operasional Bapelkes 6. Kurikulum Pelatihan yang Dibuat 7. Pelayanan Pelatihan dan Non Pelatihan yang Dilaksanakan 8. Pengembangan Sistem Pembelajaran	DIY	1. 2 Laporan 2. 6 Laporan 3. 1 Laporan 4. 1 Laporan 5. 12 Bulan 6. 1 Kurikulum 7. 1 Kegiatan 8. 1 Sistem	165,288,500	PAD, DID

## RS Paru Respira

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)				
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				32,810,002,591	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				22,396,294,591	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10,568,262,591	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN	Bantul	1 tahun	10,510,302,591	DAU
1	02	01	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan OPD	Bantul	1 tahun	57,960,000	PAD
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				19,800,000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Terlaksananya penatausahaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bantul	1 tahun	19,800,000	PAD
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,408,232,000	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianyan mebel di RSP Respira	Bantul	17 jenis	159,476,000	PAD



1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya alat komunikasi telepon Tersedianya alat penghancur kertas Tersedianya peralatan komputer lainnya Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat dapur Tersedianya komputer PC dan Laptop	Bantul	2 jenis 2 buah 8 jenis 7 jenis 14 unit	329,114,000	PAD
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya AC, kipas angin dan exhaust fan Tersedianya kamera CCTV Tersedianya tambah daya listrik	Bantul	30 unit 1 paket 1 paket	919,642,000	PAD
1	02	01	1.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				<b>10,400,000,000</b>	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya administrasi perkantoran Tersedianya akreditasi RS Tersedianya Jasa Pelayanan Rumah Sakit Tersedianya kegiatan peningkatan mutu Tersedianya kegiatan promosi kesehatan Tersedianya listrik, telepon dan air Tersedianya pelayanan oleh pihak ketiga Tersedianya pemeliharaan dan kalibrasi alat	Bantul	7 jenis 1 dokumen 6 kali 11 kegiatan 3 kegiatan 1 tahun 5 jenis 12 bulan 12 bulan 4 jenis 5 kegiatan 6 jenis 20 orang	10,400,000,000	Pendapatan dari BLUD

						kesehatan Tersedianya pemeliharaan rumah tangga rumah sakit Tersedianya peningkatan pelayanan keperawatan Tersedianya penyelenggaraan kesehatan lingkungan Tersedianya sarana penunjang pelayanan Tersedianya tenaga non PNS					
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>					<b>10,413,708,000</b>	
1	02	01	1.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>8,848,130,000</b>	
1	02	01	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya tahap persiapan pengadaan tanah RSP Respira	Bantul	1 Paket		2,659,700,000	PAD
1	02	01	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya alat kedokteran dan alat kesehatan	Bantul	18 jenis		636,100,000	DID
1	02	01	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya obat- obatan untuk pasien	Bantul	2 paket		5,552,330,000	PAD, DID
1	02	01	1.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>1,565,578,000</b>	
1	02	01	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (RUMAH SAKIT PARU RESPIRA)	Tersedianya alat bengkel Tersedianya BMHP dan reagen	Bantul	3 Jenis 2 paket		1,565,578,000	DID

RS Jiwa Grhasia

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana 2022 (tahun rencana)			
								Lokasi	Capaian target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI					
1	02	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	02	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN / Naban	RS Jiwa Grhasia	1 Tahun	20,476,543,357	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	02	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD					
1	02	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Jumlah kunjungan diklat 2. Jumlah praktikan 3. Penanganan pasien rawat inap 4. Penanganan pasien rawat jalan	RS Jiwa Grhasia	1. 4.400 orang 2. 2.400 orang 3. 2.016 pasien 4. 42.938 kunjungan	20,500,000,000	Pendapatan BLUD
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
1	02	02	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
1	02	02	1	01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan gedung trauma healing dan visum et repertum	RS Jiwa Grhasia	1 Paket	4,012,168,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
1	02	02	1	01		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
1	02	02	1	01	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1. Pengadaan perlengkapan gedung trauma healing & visum et repertum 2. Pengadaan perlengkapan ruang isolasi 3. Pengadaan dokumen AMDAL lingkungan 4. Pengadaan hardware SIMRS	RS Jiwa Grhasia	1. 1 paket 2. 1 paket 3. 1 paket 4. 1 paket	1,803,101,450	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Insentif Daerah (DID)

## BAB 5 PENUTUP

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2022 pada SKPD Dinas Kesehatan DIY. Dokumen Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai penyempurnaan dari dokumen Rencana Kerja 2022 dan merupakan bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY 2022.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022 diharapkan menjadi acuan penyelarasan dalam penetapan anggaran baik melalui sumber dana APBD DIY maupun dana dekonstrasi serta sumber dana lainnya. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan program/kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian, Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2022 disusun melalui berbagai mekanisme proses perencanaan program dan anggaran dengan harapan menjadi dukungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



KEPALA,  
drg. REMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes  
NIP. 19650912 199303 2 006

*[Handwritten signature]*



**DINAS KESEHATAN DIY**  
**JL.Gondosuli No.6 Yogyakarta**  
**Telp:(0274)563153 Faks (0274) 512368**  
**Website: [dinkes.jogjaprovo.go.id](http://dinkes.jogjaprovo.go.id)**  
**Kode Pos 55165**